

Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian  
tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada  
tanggal tersebut beserta laporan auditor independen

**Surat Pernyataan Direksi  
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ririek Adriansyah  
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133  
Alamat Domisili : Jl. Kenanga V B-6 No. 6 Taman Duta RT 002 RW 009  
Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukma Jaya, Depok  
Nomor Telepon : (022) 452 7101  
Jabatan : Direktur Utama
  
2. Nama : Heri Supriadi  
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133  
Alamat Domisili : Jl. Rancamayar No. 18 RT 001 RW 008  
Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal, Bandung  
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824  
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 April 2021



**Ririek Adriansyah**  
Direktur Utama

**Heri Supriadi**  
Direktur Keuangan



## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00884/2.1032/AU.1/06/1007-2/1/IV/2021

### **Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00884/2.1032/AU.1/06/1007-2/1/IV/2021 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Handri Tjendra, CPA  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1007

29 April 2021

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5-139

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2020

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	3,33,38	20.589	18.242
Aset keuangan lancar lainnya	4,33,38	1.303	554
Piutang usaha			
Pihak berelasi	5,33,38	1.644	1.792
Pihak ketiga	5	9.695	10.005
Aset kontrak	6,33,38	1.036	-
Piutang lain-lain	38	214	292
Persediaan	7	983	585
Biaya kontrak	9	454	-
Pajak dibayar di muka	28a	3.170	2.569
Tagihan restitusi pajak	28b	854	992
Aset lancar lainnya	8,33	6.561	6.691
Jumlah Aset Lancar		<u>46.503</u>	<u>41.722</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset kontrak	6,33,38	203	-
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	10,38	4.045	1.053
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	11	192	1.210
Biaya kontrak	9	1.254	-
Aset tetap	12,36	160.923	156.973
Aset hak guna	13	18.566	-
Aset takberwujud	15	6.846	6.446
Aset pajak tangguhan - bersih	28f	3.578	2.898
Aset tidak lancar lainnya	14,28,33,38	4.833	10.906
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>200.440</u>	<u>179.486</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><b>246.943</b></u>	<u><b>221.208</b></u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha	16,38		
Pihak berelasi	33	928	819
Pihak ketiga		16.071	13.078
Liabilitas kontrak	18a,33	7.834	-
Utang lain-lain	38	578	449
Utang pajak	28c	2.713	3.431
Beban yang masih harus dibayar	17,33,38	14.265	13.736
Pendapatan diterima di muka - jangka pendek		-	7.352
Deposito pada pelanggan	33	2.024	1.289
Utang bank jangka pendek	19a,33,38	9.934	8.705
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	19b,33,38	9.350	8.746
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	13,38	5.396	764
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>69.093</u>	<u>58.369</u>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	28f	561	1.230
Pendapatan diterima di muka - jangka panjang		-	803
Liabilitas kontrak	18b,33	1.004	-
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	32	1.254	1.066
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	31	12.976	8.078
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	20,33,38	30.561	32.293
Liabilitas sewa	13,38	10.221	1.576
Liabilitas lainnya		384	543
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>56.961</u>	<u>45.589</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<u><b>126.054</b></u>	<u><b>103.958</b></u>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	22	4.953	4.953
Tambahan modal disetor		2.711	2.711
Komponen ekuitas lainnya	23	374	408
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	30	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		79.152	76.152
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		102.527	99.561
Kepentingan non-pengendali	21	18.362	17.689
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<u><b>120.889</b></u>	<u><b>117.250</b></u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<u><b>246.943</b></u>	<u><b>221.208</b></u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2020	2019
<b>PENDAPATAN</b>	24,33	<b>136.462</b>	<b>135.567</b>
<b>BIAYA DAN BEBAN</b>			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	26,33	(34.593)	(42.226)
Beban penyusutan dan amortisasi	12,13,15	(28.892)	(23.178)
Beban karyawan	25	(14.390)	(13.012)
Beban interkoneksi	33	(5.406)	(5.077)
Beban umum dan administrasi	27,33	(6.511)	(6.696)
Beban pemasaran	33	(3.482)	(3.724)
Rugi selisih kurs - bersih		(86)	(86)
Penghasilan lain-lain - bersih		403	826
<b>LABA USAHA</b>		<b>43.505</b>	<b>42.394</b>
Penghasilan pendanaan	33	799	1.092
Biaya pendanaan	33	(4.520)	(4.240)
Rugi bersih entitas asosiasi	11	(246)	(166)
Rugi penurunan nilai investasi	11	(763)	(1.172)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>38.775</b>	<b>37.908</b>
<b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>	28d		
Pajak kini		(9.798)	(10.619)
Pajak tangguhan		586	303
		(9.212)	(10.316)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>29.563</b>	<b>27.592</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	23	15	(105)
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	23	3	6
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	11	1	16
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Rugi aktuarial - bersih	31	(3.596)	(2.109)
Rugi komprehensif lain - bersih		(3.577)	(2.192)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>25.986</b>	<b>25.400</b>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		20.804	18.663
Kepentingan nonpengendali	21	8.759	8.929
		<b>29.563</b>	<b>27.592</b>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		17.595	16.624
Kepentingan nonpengendali		8.391	8.776
		<b>25.986</b>	<b>25.400</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>			
(dalam jumlah penuh)	29		
Laba bersih per saham		210,01	188,40
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		21.000,94	18.839,68

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk								
Uraian	Catatan	Modal Saham	Tambahkan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba			Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas	
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah bersih			
<b>Saldo, 1 Januari 2019</b>		<b>4.953</b>	<b>2.455</b>	<b>507</b>	<b>15.337</b>	<b>75.658</b>	<b>98.910</b>	<b>18.393</b>	<b>117.303</b>	
Penambahan setoran modal anak perusahaan		-	-	-	-	-	-	59	59	
Transaksi entitas sepengendali		-	256	-	-	-	256	9	265	
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	70	70	
Dividen kas		-	-	-	-	(16.229)	(16.229)	(9.618)	(25.847)	
Laba tahun berjalan	21	-	-	-	-	18.663	18.663	8.929	27.592	
Rugi komprehensif lain - bersih		-	-	(99)	-	(1.940)	(2.039)	(153)	(2.192)	
<b>Saldo, 31 Desember 2019</b>		<b>4.953</b>	<b>2.711</b>	<b>408</b>	<b>15.337</b>	<b>76.152</b>	<b>99.561</b>	<b>17.689</b>	<b>117.250</b>	
Dampak penerapan standar akuntansi baru		-	-	(52)	-	685	633	39	672	
<b>Saldo, 1 Januari 2020</b>		<b>4.953</b>	<b>2.711</b>	<b>356</b>	<b>15.337</b>	<b>76.837</b>	<b>100.194</b>	<b>17.728</b>	<b>117.922</b>	
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	21	21	
Dividen kas	30	-	-	-	-	(15.262)	(15.262)	(7.778)	(23.040)	
Laba tahun berjalan	21	-	-	-	-	20.804	20.804	8.759	29.563	
Rugi komprehensif lain - bersih		-	-	18	-	(3.227)	(3.209)	(368)	(3.577)	
<b>Saldo, 31 Desember 2020</b>		<b>4.953</b>	<b>2.711</b>	<b>374</b>	<b>15.337</b>	<b>79.152</b>	<b>102.527</b>	<b>18.362</b>	<b>120.889</b>	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI</b>			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		133.610	135.372
Penerimaan restitusi pajak		4.687	1.446
Penerimaan dari pendapatan bunga		806	1.093
Pembayaran kas untuk beban		(40.533)	(56.787)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(11.452)	(10.348)
Pembayaran kas kepada karyawan		(11.057)	(11.370)
Pembayaran beban bunga		(4.768)	(4.358)
Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah	13	(3.731)	-
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		(2.593)	(861)
Penerimaan kas lainnya - bersih		348	762
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi</b>		<b>65.317</b>	<b>54.949</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI</b>			
Hasil dari penjualan aset tetap	12	236	1.496
Hasil dari klaim asuransi	12	234	197
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	10	5	11
Pembelian aset tetap	12,40	(29.560)	(35.131)
Penambahan penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	11	(2.809)	(144)
Pembelian aset takberwujud	15,40	(2.538)	(2.008)
(Penempatan pada) hasil dari aset keuangan lancar lainnya - bersih		(796)	1.147
Penambahan penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi	10	(28)	(588)
Hasil dari pelepasan anak perusahaan		-	395
Akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh	1d	-	(1.166)
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi</b>		<b>(35.256)</b>	<b>(35.791)</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN</b>			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	19,20	24.469	26.524
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	19,20	(24.380)	(18.983)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	30	(15.262)	(16.229)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak	21	(7.778)	(9.618)
Pembayaran kewajiban sewa	13	(4.802)	-
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		-	59
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan</b>		<b>(27.753)</b>	<b>(18.247)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>2.308</b>	<b>911</b>
<b>DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>39</b>	<b>(108)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>3</b>	<b>18.242</b>	<b>17.439</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>3</b>	<b>20.589</b>	<b>18.242</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 22).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk menyesuaikan kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") serta untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 32 tanggal 21 Juni 2019. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan surat No. AHU-0032595.AH.01.02 tanggal 24 Juni 2019.

Pada tahun 2020, Perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar mengubah nama Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau disingkat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. di Bursa Efek Indonesia.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019, Perusahaan melakukan perubahan susunan pengurus Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn. No 12 tanggal 10 Juli 2020. Perubahan susunan pengurus telah diterima oleh Menkumham berdasarkan surat AHU-AH.01.03-0291419 tanggal 16 Juli 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk mendapatkan/mengejar laba guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang secara umum meliputi:

i. Usaha utama:

- (a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

ii. Usaha penunjang:

- (a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- (b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- (c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)**

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo"), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPP") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbit uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DSAP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPP/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	839/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	844/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	948/KEP/M.KOMINFO/ 05/2016	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	31 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	191/KEP/DJPP/ KOMINFO/10/2016	Jasa sistem komunikasi data	31 Oktober 2016

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)**

Izin	No. Izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/M.KOMINFO/16/2017 1004/KEP/	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	M.KOMINFO/2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan**

**i. Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada RUPST yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 12 tanggal 10 Juli 2020 dan No. 133 tanggal 24 Mei 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali
Komisaris	Alex Denni	-
Komisaris	Rizal Mallarangeng	-
Komisaris	Ahmad Fikri Assegaf	-
Komisaris	Ismail	Ismail
Komisaris	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Komisaris Independen	Marsudi Wahyu Kisworo	Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen	Wawan Iriawan	Cahyana Ahmadjayadi
Komisaris Independen	Chandra Arie Setiawan	Margiyono Darsasumarja
Direktur Utama	Ririek Adriansyah	Ririek Adriansyah
Direktur Keuangan	Heri Supriadi	Harry Mozarta Zen
Direktur <i>Digital Business</i>	Muhammad Fajrin Rasyid	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Budi Setyawan Wijaya	Achmad Sugiarto
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Edi Witjara	Bogi Witjaksono
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Dian Rachmawan	Edwin Aristiawan
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Afriwandi	Edi Witjara
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Herlan Wijanarko	Zulhelfi Abidin
Direktur <i>Consumer Service</i>	FM Venusiana R	Siti Choiriana

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary*, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)**

ii. Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, *Corporate Secretary*, dan Internal Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ketua	Chandra Arie Setiawan	Margiyono Darsasumarja
Anggota	Marsudi Wahyu Kisworo	Tjatur Purwadi
Anggota	Wawan Iriawan	Ismail
Anggota	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Anggota	Sarimin Mietra Sardi	Sarimin Mietra Sardi
Anggota	Ahmad Fikri Assegaf	-
Anggota	Emmanuel Bambang Suyitno	-
<i>Corporate Secretary</i>	Andi Setiawan	Andi Setiawan
Internal Audit	Harry Suseno Hadisoebroto	Harry Suseno Hadisoebroto

iii. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 25.348 orang dan 24.272 orang.

**c. Penawaran umum efek Perusahaan**

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)**

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Pada Rapat Umum Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2005 dan RUPST pada tanggal 29 Juni 2007, 20 Juni 2008, dan 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III, dan IV program Perusahaan untuk membeli kembali saham Seri B yang telah diterbitkan.

Selama periode 21 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2007, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali 211.290.500 saham dari publik (program pembelian kembali saham tahap I). Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual seluruh saham tersebut.

Pada RUPST tanggal 19 April 2013, sebagaimana diaktakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn., No. 38 tanggal 19 April 2013, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas treasury stock yang diakuisisi dalam tahap III.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B (Catatan 22). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 38.393.803 ADS telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 22).

Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah kedua masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 20b.i).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 20b.i).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menjual sisa saham treasury tahap III.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan menjual saham treasury tahap IV.

Pada RUPST tanggal 27 April 2018 yang diaktakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 54, para pemegang saham menyetujui pembatalan 1.737.779.800 saham treasury dengan mengurangi modal saham Perseroan.

**d. Entitas anak**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

**i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung:**

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2020	2019	2020	2019
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	103.652	82.730
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya/ 17 Mei 2001	1995	100	100	25.368	20.114
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	17.708	16.478
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	12.187	10.970
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	100	100	6.163	6.055
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	4.484	3.309
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	4.154	4.436
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	1.868	2.995
PT Metra-Net ("Metra-Net"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	1.320	996
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	1.074	1.706

\*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Entitas anak (lanjutan)**

**i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):**

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2020	2019	2020	2019
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network</i> , Access Point ("NAP"), <i>Voice Over Data</i> ("VOD"), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

\*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

**ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:**

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2020	2019	2020	2019
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	6.031	6.796
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	100	100	3.461	1.475
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., ("Telin Singapore"), Singapore	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.320	3.635
Telekomunikasi Indonesia International Ltd. ("Telin Hong Kong"), Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	2.652	1.830
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100	100	2.390	2.626
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.204	2.056
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	1.371	1.001

\*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Entitas anak (lanjutan)**

**ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):**

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2020	2019	2020	2019
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	100	100	1.115	1.146
PT Melon Indonesia ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	848	578
PT Persada Sokka Tama ("PST"), Jakarta, Indonesia	Penyediaan sarana prasarana jaringan telekomunikasi/ 19 Februari 2019	2008	95	95	824	870
Telekomunikasi Indonesia International ("Telin TL") S.A., Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	719	706
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), Petaling Jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	70	70	669	732
PT Telkomsel Mitra Inovasi ("TMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi modal/ 18 Januari 2019	2019	100	100	594	569
PT Swadharma Sarana Informatika ("SSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM/ 2 April 2018	2001	51	51	577	520
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	480	395
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	100	100	316	272
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	289	288

\*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Entitas anak (lanjutan)**

**ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):**

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2020	2019	2020	2019
PT Metraplaza ("Metraplaza"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	260	214
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	60	137	177
Telekomunikasi Indonesia International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	115	89
Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	88	86
Telekomunikasi Indonesia Intl (Malaysia) Sdn. Bhd. ("Telin Malaysia"), Malaysia	Telekomunikasi/ 2 Juli 2013	2013	70	70	39	67
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	100	100	14	16

\*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.

**e. Transaksi akuisisi pada entitas anak**

**i. Dayamitra**

**PST**

Pada tanggal 19 Februari 2019, Dayamitra telah mengakuisisi 95% kepemilikan langsung di PST dari Rahina Dewayani dan Rahayu berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat. Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra membeli 95% kepemilikan saham PST senilai Rp1.113 miliar dan wajib membeli sisa 5% kepemilikan saham PST dalam waktu maksimal 24 bulan sejak 8 Maret 2019, dengan harga per saham yang sama dengan akuisisi 95% saham sebelumnya. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, pada tanggal 31 Desember 2019 Dayamitra mengakui kewajiban kepada pemilik saham sebelumnya sebesar Rp80 miliar. Sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, pada tanggal akuisisi, Dayamitra secara substansial telah memiliki 100% kepemilikan saham PST. Akuisisi ini dicatat sebagai kombinasi bisnis.

PST adalah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sewa menara. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perusahaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**e. Transaksi akuisisi pada entitas anak (lanjutan)**

i. Dayamitra (lanjutan)

Akuisisi Menara Indosat

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Dayamitra menandatangani *Sales Purchase Agreement* ("SPA") dengan PT Indosat Tbk. ("Indosat") terkait pembelian menara milik Indosat. Hal-hal yang ditetapkan dan disepakati secara simultan dengan SPA adalah sebagai berikut:

- (a) Pengalihan kepemilikan atas 2.100 menara telekomunikasi (3.982 *tenant*) beserta perizinannya;
- (b) Pengalihan sewa tanah untuk 1.731 lokasi yang sebelumnya disewa oleh Indosat ke pihak ketiga;
- (c) Penyewaan sewa tanah untuk 369 lokasi yang dimiliki oleh Indosat; dan
- (d) Pengalihan kontrak berserta detail pengguna dengan 3.982 penyewa kolokasi yang sudah ada di menara yang diakuisisi.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Dayamitra dan Indosat telah melakukan penandatanganan *Letter Agreement (Closing Memo)*, sebagai tindaklanjut SPA yang ditandatangani oleh Indosat dan Dayamitra senilai Rp4.443 miliar.

Selain itu, disepakati juga penyewaan kembali oleh Indosat atas masing-masing 1 slot di 2.100 menara telekomunikasi yang diakuisisi oleh Dayamitra yang ditandai dengan penandatanganan *Master Tower Lease Agreement* ("MTLA"). Transaksi akuisisi ini diperlakukan sebagai transaksi akuisisi aset.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi pada saat akuisisi untuk kedua transaksi di atas adalah sebagai berikut:

	<b>Menara Indosat</b>	<b>Saham PST</b>	<b>Total</b>
<b>Aset</b>			
Aset lancar	517	146	663
Aset tetap	3.453	634	4.087
Aset tidak lancar	-	91	91
Liabilitas	-	(610)	(610)
Nilai buku aset neto	<u>3.970</u>	<u>261</u>	<u>4.231</u>
Selisih nilai wajar dengan nilai buku aset tetap	-	398	398
Hubungan pelanggan (aset takberwujud)	473	194	667
Pajak tangguhan	-	(148)	(148)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	4.443	705	5.148
<b>Nilai wajar imbalan yang dialihkan</b>	<b><u>4.443</u></b>	<b><u>1.172</u></b>	<b><u>5.615</u></b>
<i>Goodwill</i>	-	467	467

ii. Telkomsel

Berdasarkan akta notaris Bonardo Nasution, S.H. No. 12 tanggal 18 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan, TMI. Pada tanggal 18 Februari 2019, Telkomsel menyetorkan modal awal sebesar Rp550 miliar untuk 549.989 lembar saham dari keseluruhan 550.000 lembar saham TMI.

TMI bergerak di bidang inovasi dan *strategic investment*. Investasi baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perusahaan dalam rangka bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi *digital*.

**f. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 29 April 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

### **a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp") dan jutaan US\$, kecuali dinyatakan lain. Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi dibawah Rp1 miliar dan US\$ 1 juta disajikan dengan angka nol.

#### **Standar akuntansi baru**

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

- i. PSAK 71: Instrumen Keuangan
- ii. PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
- iii. PSAK 73: Sewa

Perubahan standar akuntansi keuangan di atas dan dampaknya dijelaskan dalam Catatan 2ac.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- i. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- ii. Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- iii. Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- iv. ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.
- v. Amandemen PSAK 55, PSAK 60, dan PSAK 71: Reformasi Acuan Suku Bunga
- vi. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

#### **Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif**

Berlaku efektif 1 Januari 2021:

- i. Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis  
Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

**Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

Berlaku efektif 1 Januari 2021 (lanjutan):

- ii. Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan
- iii. Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2  
Amandemen ini mengatur reformasi acuan suku bunga-tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai.
- iv. Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021  
Amandemen ini mengatur bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait COVID-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan. Amandemen ini memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan cara praktis, menjadi 30 Juni 2022.

Berlaku efektif 1 Januari 2022:

- i. Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis  
Amandemen ini mengatur tentang referensi ke Kerangka Konseptual dengan mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- ii. Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi  
Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- iii. Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan  
Amandemen ini mengklarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan.
- iv. Amandemen PSAK 73: Sewa  
Amandemen ini mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait "perbaikan properti sewaan".

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- i. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan  
Amandemen ini mengklarifikasi klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang.
- ii. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap  
Amandemen ini mengatur tentang perlakuan atas hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.

**b. Prinsip konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Prinsip konsolidasi (lanjutan)**

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah ia memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

**c. Transaksi dengan pihak berelasi**

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Kombinasi bisnis dan *goodwill***

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

*Goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interests*).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)**

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**e. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas ditangan, kas dan bank, dan deposito jangka pendek yang sangat likuid dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan deposito jangka pendek, sesuai definisi di atas, setelah dikurangi dengan saldo cerukan bank karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Grup.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 2t).

**f. Penyertaan pada entitas asosiasi**

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak. Kepemilikan 20% atau lebih hak suara *investee* (dimiliki secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan) dianggap menimbulkan pengaruh signifikan, kecuali dapat dijelaskan secara jelas bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Sebaliknya, kepemilikan kurang dari 20% hak suara dianggap tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa sebenarnya terdapat pengaruh signifikan.

Adanya pengaruh signifikan biasanya akan dibuktikan dengan satu atau beberapa cara sebagai berikut:

- i. Keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara dari *investee*;
- ii. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen dan distribusi lainnya;
- iii. Transaksi material diantara investor dan *investee*;
- iv. Pertukaran personil manajerial; atau
- v. Penyediaan informasi teknis penting.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- i. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu, dan
- ii. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam “Penyertaan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai “Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan” pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

**g. Piutang usaha dan piutang lain-lain**

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi provisi penurunan nilai yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan metodologi perhitungan estimasi penyisihan tersebut berdasarkan pengalaman historis kredit tak tertagih yang kemudian disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Piutang dihapuskan pada tahun ditetapkan tidak tertagih (Catatan 2t).

**h. Persediaan**

Persediaan terdiri dari komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* (“SIM”), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan voucher prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ditentukan dengan mengestimasi harga jual, dikurangi estimasi biaya penjualan atau menentukan biaya penggantian yang berlaku.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

**i. Beban dibayar di muka**

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**j. Aset takberwujud**

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, kecuali *goodwill* diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<b>Tahun</b>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**k. Aset tetap**

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<b>Tahun</b>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-30
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Kendaraan	4-8
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**k. Aset tetap (lanjutan)**

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Berdasarkan reviu umur manfaat aset tetap khususnya beberapa peralatan produksi mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

**l. Sewa**

**Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020**

PSAK 73 menetapkan model komprehensif untuk mengidentifikasi perjanjian sewa dan perlakuannya dalam laporan keuangan Penyewa dan Pesewa. PSAK 73 memperkenalkan model pengendalian untuk identifikasi sewa, membedakan antara sewa dan kontrak layanan berdasarkan apakah ada aset identifikasi yang dikendalikan oleh pelanggan.

Grup menerapkan PSAK 73 pada 1 Januari 2020 dengan menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan mengakui dampak kumulatif penerapan awal PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020. Dengan demikian data komparasi tahun 2019 tidak disajikan kembali dan disajikan sesuai standar sebelumnya dan interpretasi terkait.

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus dimana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**I. Sewa (lanjutan)**

**Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73, yang antara lain:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa dimana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diidentifikasi berdasarkan PSAK 30R, dan tidak menerapkan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya tidak diidentifikasi berdasarkan standar ini;
- tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk sewa dimana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum US\$5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru).

PSAK 73 juga mengizinkan Grup untuk melanjutkan penilaian sewa historis yang memungkinkan Grup untuk tidak menilai kembali hasil penilaian Grup sebelumnya tentang identifikasi sewa, klasifikasi sewa dan Grup telah memilih untuk membawa saldo penilaian sewa historis dan mengandalkan penilaian yang telah dibuat berdasarkan PSAK 30 dan ISAK 8 dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa. penilaian yang telah di. Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa yang dibuat atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020.

**i. Grup sebagai lessee**

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat dari aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Instalasi dan peralatan transmisi	3-25
Catu daya	3-20
Kendaraan	4-8
Lain-lain	2-25

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**I. Sewa (lanjutan)**

**Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

i. Grup sebagai *lessee* (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan tingkat pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat suku bunga yang tersirat dalam sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan, berakhir dalam 12 bulan setelah 1 Januari 2020 dan sewa bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Grup sebagai *lessor*

Berdasarkan PSAK 73, lessor terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa dimana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal awal dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada lessor oleh lessee. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh lessee dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 71, penyisihan kerugian kredit yang diharapkan telah diakui sebagai "Piutang Lain-lain".

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan pendapatan PSAK 72 dari kontrak dengan pelanggan untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**I. Sewa (lanjutan)**

**Kebijakan Akuntansi untuk Sewa yang diterapkan hingga 31 Desember 2019**

i. Sebagai *lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan pada tanggal dimulainya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan saham ke Grup diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Sewa pembiayaan dikapitalisasi di awal periode sewa pada nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dibagi menjadi biaya keuangan dan biaya sewa. Biaya keuangan dialokasikan ke setiap periode selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Biaya keuangan tersebut diakui sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi.

Grup tidak mengubah jumlah tercatat awal aset dan liabilitas yang diakui pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (sebagai contoh aset hak guna dan liabilitas sewa sama dengan aset dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 30R). Persyaratan PSAK 73 diterapkan untuk sewa ini mulai 1 Januari 2020.

Aset sewaan disusutkan berdasarkan umur manfaatnya. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan. Pembayaran yang dibebankan dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

ii. Sebagai *lessor*

Sewa dimana Grup tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset pendasar dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut diperoleh. Pendapatan sewa operasi disajikan dalam Pendapatan dari transaksi *lessor* (Catatan 2q).

**m. Beban tanggungan - hak atas tanah**

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**n. Utang usaha**

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang dan/atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Pinjaman**

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

**p. Penjabaran valuta asing**

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd., dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd. yang menggunakan Ringgit Malaysia.

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	2020		2019	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.040	14.060	13.880	13.885
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.738	10.756	9.724	9.729
Dolar Singapura ("SGD") 1	10.591	10.607	10.312	10.317
Dolar Taiwan Baru ("TWD") 1	499,61	500,46	463,73	464,65
Euro ("EUR") 1	17.209	17.239	15.559	15.571
Yen Jepang ("JPY") 1	135,91	136,15	127,76	127,82
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.477	3.485	3.390	3.394
Pataca Makau ("MOP") 1	1.756	1.761	1.729	1.731
Dolar Hong Kong ("HKD") 1	1.811	1.814	1.782	1.783

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2k).

**q. Pengakuan pendapatan dan beban**

**Kebijakan akuntansi untuk pendapatan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020**

**Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan**

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi untuk pendapatan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Grup mengadopsi PSAK 72 pada 1 Januari 2020 menggunakan metode retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui efek kumulatif dari awal penerapan PSAK 72 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas pada 1 Januari 2020.

Grup telah memilih untuk menerapkan pendekatan praktis berikut pada tanggal transisi:

- (i) Kontrak yang telah diselesaikan - Grup menerapkan PSAK 72 hanya untuk kontrak pelanggan yang belum selesai pada 1 Januari 2020; dan
- (ii) Modifikasi kontrak - alih-alih menerapkan pendekatan retrospektif untuk mengukur efek kumulatif dari modifikasi kontrak sejak tiap modifikasi dilakukan; Grup mengumpulkan efek dari semua modifikasi kontrak yang terjadi sebelum 1 Januari 2020 untuk:
  - (a) Mengidentifikasi kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan;
  - (b) Menentukan harga transaksi dari kontrak modifikasian terbaru; dan
  - (c) Mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja yang telah dan belum dilaksanakan pada 1 Januari 2020.

Selain itu, Grup juga memilih untuk menerapkan pendekatan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pendanaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengiriman barang atau jasa tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun, dalam mengadopsi PSAK 72.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan:

**i. *Mobile***

Pendapatan dari *mobile* terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain: layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan *Short Messaging Service* ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau prabayar, dimana yang untuk prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucher pengisian awal) dan voucher pengisian pulsa diakui pada awalnya sebagai liabilitas kontrak.

Seluruh pendapatan layanan *mobile* diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi dan poin yang dikeluarkan, dimana pembayaran dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin ditentukan berdasarkan informasi historis terkait dengan tingkat penebusan poin penghargaan. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat poin tersebut ditebus atau telah kedaluwarsa.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi untuk pendapatan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

ii. *Consumer*

Pendapatan dari *consumer* terutama terdiri dari pendapatan telepon tidak bergerak dan layanan Indihome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan pendapatan dari layanan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk ritel. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan.

Grup memiliki paket layanan bundel bernama "Indihome". Dalam paket ini, pelanggan dapat berlangganan kombinasi layanan consumer (misalnya telepon, data dan internet, serta TV berbayar).

Seluruh layanan *consumer* diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

Pelanggan mungkin diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menanggung nilai tersebut dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. *Enterprise*

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* terutama terdiri dari pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal penjualan periferal, *manage service*, *call center*, *e-health*, *e-payment*, dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, *kilobyte data*, dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

Beberapa perjanjian dengan pelanggan *enterprise* ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai. Atau, ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi untuk pendapatan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iii. *Enterprise* (lanjutan)

Kontrak tertentu dengan pelanggan *enterprise* dapat menimbulkan imbalan variabel karena harga kontrak tergantung pada peristiwa di masa mendatang (misalnya kontrak berbasis penggunaan atau kontrak berbasis bagi hasil). Dalam memperkirakan imbalan variabel ini, Grup diharuskan untuk menggunakan metode nilai yang diharapkan atau metode jumlah yang paling mungkin berdasarkan metode yang lebih baik memprediksi jumlah pembayaran yang menjadi haknya. Grup menentukan bahwa metode nilai yang paling diharapkan adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memperkirakan imbalan variabel untuk satu kontrak dengan sejumlah besar kemungkinan hasil.

Sebelum memasukkan jumlah imbalan variabel dalam harga transaksi, Grup mempertimbangkan apakah jumlah imbalan variabel dibatasi. Grup menentukan bahwa taksiran imbalan variabel tidak dibatasi berdasarkan pengalaman historisnya, estimasi bisnis, dan kondisi ekonomi saat ini dan hanya mencakup imbalan variabel sepanjang kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya diselesaikan.

Ketika pihak lain terlibat dalam menyediakan produk dan/atau jasa kepada pelanggan, Grup bertindak sebagai prinsipal jika Grup mengendalikan produk dan/atau jasa yang ditentukan sebelum produk dan/atau jasa tersebut ditransfer ke pelanggan. Pendapatan dicatat pada jumlah bersih yang diterima (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok), ketika, pada dasarnya, Grup telah bertindak sebagai agen dan mendapat komisi dari pemasok produk dan/atau jasa yang dijual.

iv. *Wholesale and International Business Services* ("WIB")

Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk atau jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Pendapatan dari transaksi *lessor*

Pendapatan dari transaksi *lessor* terdiri dari pendapatan dari sewa menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi untuk pendapatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019**

i. Pendapatan telepon selular

Pendapatan dari jasa pascabayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- (a) Pendapatan pulsa dan pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- (b) Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan voucher perdana) dan voucher isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada voucher prabayar telah habis masa berlakunya.

ii. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. Pendapatan Indihome

Pendapatan Indihome berasal dari pelanggan *consumer* yang berlangganan layanan internet atau lebih dari satu produk *retail*. Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Kontrak ditawarkan sebagai kontrak bulan ke bulan dan pendapatan diakui secara bulanan sesuai tagihan paket Indihome.

Penerimaan dari instalasi sambungan Indihome ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iv. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

v. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi untuk pendapatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan)**

vi. Pendapatan jaringan

Pendapatan jaringan terdiri dari pendapatan sewa sirkuit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vii. Pendapatan lainnya

Pendapatan dari penjualan periferal atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

viii. *Multiple-element arrangements*

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan di atas.

ix. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

x. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu atas pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditanggung dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

xi. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

**r. Imbalan kerja**

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Imbalan kerja (lanjutan)**

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- (a) ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- (b) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Imbalan kerja (lanjutan)**

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

**s. Pajak**

Pajak Penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak ("SKP") atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**s. Pajak (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui diluar laba rugi, oleh karena itu pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak pertambahan nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-Lain - bersih".

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan**

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020**

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Grup mengadopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

**i. Aset keuangan**

**Pengakuan dan pengukuran awal**

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur pada harga transaksi yang telah ditentukan berdasarkan PSAK 72.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari perolehan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan kedalam empat kategori:

**(a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)**

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, dan aset tidak lancar lainnya.

**(b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)**



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 31 Desember 2020.

- (c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai.

- (d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi *SPPI testing* diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Aset keuangan yang dimiliki untuk dijual diungkapkan sebagai bagian dalam catatan aset keuangan lancar, sementara itu yang lain diungkapkan dalam investasi jangka panjang dalam utang dan instrument ekuitas.

Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL")

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian dalam 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk model provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) yaitu kondisi pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Penghapusan piutang usaha dilakukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan utang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (b) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 20 Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Lainnya.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (i) situasi bisnis yang normal;
- (ii) peristiwa *default*; dan
- (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan yang diterapkan sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)**

iv. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Akuntansi lindung nilai

Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai.

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019**

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Grup termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dan piutang lain-lain, aset keuangan tidak lancar lainnya dan penyertaan tersedia untuk dijual.

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai penghasilan (beban) lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dan piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (piutang usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya).

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019**

(c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh Grup sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

(d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari reksadana, obligasi korporasi dan negara, dan modal saham yang dicatat sebagai "Aset keuangan lancar lainnya" dan "Penyertaan jangka panjang pada Entitas Asosiasi" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale investment*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus.

**Penurunan nilai aset keuangan**

Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Grup terlebih dahulu menilai apakah penurunan nilai terjadi secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan, atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak signifikan. Jika Grup tidak menemukan bukti yang objektif atas penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individu, terlepas apakah signifikan maupun tidak, aset keuangan tersebut dimasukkan dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tidak diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (diluar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini). Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset berkurang melalui penggunaan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi atau grup investasi mengalami penurunan nilai. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain konsolidasian dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain konsolidasian diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

(a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

(b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (a) situasi bisnis yang normal;
- (b) peristiwa kegagalan; dan
- (c) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi instrumen keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 (lanjutan)**

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

v. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh risiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

**u. Sukuk Ijarah**

Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Grup diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui pada laporan laba rugi sebagai beban penerbitan sukuk.

Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

**v. Modal saham yang diperoleh kembali**

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambah Modal Disetor".

**w. Dividen**

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Laba per saham dan laba per ADS**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

**y. Informasi segmen**

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**z. Provisi**

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

**aa. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**aa. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi konsolidasian.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

**ab. Klasifikasi lancar dan tidak lancar**

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggungkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

**ac. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan**

**PSAK 71**

Grup telah menerapkan PSAK 71 dengan pendekatan modifikasi retrospektif pada tanggal efektif yang disyaratkan, 1 Januari 2020. Saldo awal 2020 telah disesuaikan, tetapi periode sebelumnya tidak disajikan kembali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi:

- i. Klasifikasi dan pengukuran

Berdasarkan PSAK 71, Grup mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi, dan diukur dengan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Sebelumnya berdasarkan PSAK 55 (2013), diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini didasarkan pada dua kriteria: model bisnis Grup untuk mengelola aset; dan apakah arus kas kontraktual instrumen hanya terkait pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terhutang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ac. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

PSAK 71 (lanjutan)

i. Klasifikasi dan pengukuran (lanjutan)

Penilaian model bisnis Grup dilakukan pada tanggal implementasi awal, 1 Januari 2020, dan kemudian diterapkan secara retrospektif pada aset-aset keuangan yang tidak dihentikan pengakuannya sebelum 1 Januari 2020. Penilaian apakah arus kas kontraktual pada instrumen utang hanya atas pembayaran pokok dan bunga dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan pada saat pengakuan awal aset.

Persyaratan klasifikasi dan pengukuran PSAK 71 berdampak pada beberapa aset keuangan Grup yang tersedia untuk dijual karena harus diukur melalui nilai wajar melalui laba rugi karena arus kas kontraktual instrumen tidak hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga. Grup mengukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk semua aset keuangan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang berdasarkan PSAK 55 (2013).

Tabel di bawah ini menggambarkan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan berdasarkan PSAK 71 dan PSAK 55 pada tanggal aplikasi awal, 1 Januari 2020:

	<b>Pengukuran berdasarkan kategori PSAK 55</b>	<b>Pengukuran berdasarkan kategori PSAK 71</b>
Kas dan setara kas	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi
Piutang usaha	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi
Obligasi konversi	Aset tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui laba rugi
Instrumen utang	Aset tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Investasi pada ekuitas	Aset tersedia untuk dijual	Nilai wajar melalui laba rugi

ii. Penurunan Nilai

Penerapan PSAK 71 secara fundamental telah mengubah akuntansi Grup untuk kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dengan mengganti pendekatan penurunan nilai dalam PSAK 55 (2013) dengan pendekatan *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian. PSAK 71 mengharuskan Grup untuk mengakui penyisihan ECL untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset kontrak.

PSAK 72

Grup telah mengimplementasikan PSAK 72 sejak 1 Januari 2020 menggunakan pendekatan retrospektif dimodifikasi, yang berarti Grup tidak menyajikan kembali angka perbandingan tetapi penyesuaian terhadap jumlah tercatat pada tanggal transisi diakui dalam saldo awal dari saldo laba dan kepentingan non-pengendali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi:

- i. Berdasarkan PSAK 72, aset kontrak dan liabilitas kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sebelumnya, aset kontrak dilaporkan sebagai piutang usaha dan liabilitas kontrak dilaporkan sebagai pendapatan diterima di muka.
- ii. Biaya kontrak yang terdiri dari biaya untuk memperoleh dan memenuhi kontrak disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Sebelumnya, biaya kontrak ini dibebankan pada saat terjadinya atau diamortisasi dengan dasar sistematis yang tidak konsisten dengan pengakuan pendapatan terkait.
- iii. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang diukur berdasarkan PSAK 72 disajikan secara terpisah dari pendapatan dari transaksi *lessor*.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ac. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

PSAK 72 (lanjutan)

Pada tanggal transisi PSAK 72, implementasi imbalan variabel dan waktu pengakuan pendapatan menyebabkan Grup mengakui kenaikan laba ditahan sebesar pendapatan yang diakui atas kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan berdasarkan PSAK 72, hal ini karena pendapatan yang diakui lebih besar dari standar sebelumnya. Grup mengakui aset kontrak sebagai hak Grup atas imbalan kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan. Aset kontrak selanjutnya direklasifikasi sebagai piutang usaha ketika seluruh kewajiban atas imbalan telah diselesaikan.

Grup juga mengkapitalisasi biaya inkremental untuk memperoleh dan memenuhi kontrak dengan pelanggan. Berbeda dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Grup untuk mengeluarkan biaya-biaya ini pada saat terjadi, biaya kontrak dikapitalisasi dan diamortisasi secara konsisten seiring dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan biaya kontrak.

PSAK 73

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan modifikasi retrospektif pada tanggal efektif yang disyaratkan, 1 Januari 2020. Saldo pembukaan 2020 telah disesuaikan, tetapi periode sebelumnya tidak disajikan kembali. Beberapa perubahan utama yang berdampak pada Grup meliputi:

i. Aset hak pakai dan liabilitas sewa

Penerapan PSAK 73 menghasilkan pembayaran sewa minimum Grup di masa depan berdasarkan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk diakui sebagai liabilitas sewa guna usaha dengan Aset hak guna ("ROU").

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tersisa, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman penyewa pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman penyewa yang diterapkan pada kewajiban sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 7,33%.

ii. Subsewa

Grup telah mereklasifikasi beberapa perjanjian subsewa sebagai sewa pembiayaan. Bagian dari aset hak guna yang merupakan kontrak subsewa dihentikan pengakuannya dan piutang subsewa diakui di laporan posisi keuangan ketika subsewa tersebut dimulai.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ac. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

Dampak penerapan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 adalah sebagai berikut:

	<b>1 Januari 2020</b>
<b>ASET</b>	
Kas dan setara kas	(1)
Piutang usaha	(1.119)
Aset kontrak	947
Piutang lain-lain	(95)
Biaya kontrak	1.185
Aset lancar lainnya	(1.207)
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	294
Aset tetap	(2.154)
Aset hak guna	20.413
Aset pajak tangguhan - bersih	(99)
Aset tidak lancar lainnya	(3.170)
	<b>14.994</b>
<b>LIABILITAS</b>	
Pendapatan diterima di muka	8.155
Liabilitas kontrak	(8.224)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	7
Liabilitas sewa	(14.260)
	<b>(14.322)</b>
<b>EKUITAS</b>	
Komponen ekuitas lainnya	52
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	(685)
Kepentingan nonpengendali	(39)
	<b>(672)</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ac. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)**

Dampak perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>Standar baru</u>	<u>Standar sebelumnya</u>	<u>Penyesuaian</u>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>			
<b>ASET</b>			
Kas dan setara kas	20.589	20.589	0
Piutang usaha	11.339	12.405	(1.066)
Aset kontrak	1.036	-	1.036
Piutang lain-lain	214	268	(54)
Biaya kontrak	454	-	454
Aset lancar lainnya	6.561	6.792	(231)
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	4.045	3.820	225
Aset tetap	160.923	163.077	(2.154)
Aset hak guna	18.566	-	18.566
Aset pajak tangguhan - bersih	3.578	3.907	(329)
Aset kontrak - bagian tidak lancar	203	-	203
Biaya kontrak - bagian tidak lancar	1.254	-	1.254
Aset tidak lancar lainnya	4.833	8.003	(3.170)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>233.595</b>	<b>218.861</b>	<b>14.734</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban yang masih harus dibayar	14.265	14.627	(362)
Pendapatan diterima dimuka	-	7.834	(7.834)
Liabilitas kontrak	7.834	-	7.834
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.396	2.515	2.881
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	561	580	(19)
Pendapatan diterima di muka - jangka pendek	-	1.004	(1.004)
Liabilitas kontrak	1.004	-	1.004
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	30.561	29.198	1.363
Liabilitas sewa	10.221	-	10.221
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>69.842</b>	<b>55.758</b>	<b>14.084</b>
<b>EKUITAS</b>			
Komponen ekuitas lainnya	374	349	25
Laba ditahan - belum ditentukan penggunaannya	79.152	78.350	802
Kepentingan non-pengendali	18.362	18.539	(177)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>97.888</b>	<b>97.238</b>	<b>650</b>
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN</b>			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	(34.593)	(39.202)	4.609
Beban penyusutan dan amortisasi	(28.892)	(24.523)	(4.369)
Beban umum dan administrasi	(6.511)	(6.823)	312
Beban pemasaran	(3.482)	(4.233)	751
Penghasilan lain - lain bersih	403	744	(341)
Biaya pendanaan	(4.520)	(3.624)	(896)
Pajak tangguhan	586	793	(207)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk	20.804	20.769	35
Kepentingan non-pengendali	8.759	8.936	(177)
			<b>(dalam miliaran rupiah)</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN</b>			
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi</b>			
Aset sewa jangka pendek dan bernilai rendah			(3.731)
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan</b>			
Pembayaran pokok atas liabilitas sewa			(4.802)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang.

i. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 28.

ii. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

(a) Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)**

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(a) Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 31 dan 32.

(b) Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 12.

(c) Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup masuk akal untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)**

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(d) Kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk deposito berjangka dan instrumen utang pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

Terkait efek pandemi Covid-19, Grup tidak merubah definisi dari kenaikan risiko kredit yang signifikan maupun definisi gagal bayar. Grup juga mengamati perubahan dari keserupaan karakteristik risiko dari piutang usaha tertentu dengan mengevaluasi segmentasi portofolio pelanggan, dimana pelanggan tersebut mungkin terlibat dalam industri bisnis, atau berlokasi di area, yang telah terpengaruh, atau lebih rentan terhadap pandemi. Grup telah mengkaji ulang model yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan informasi terkini yang wajar dan terdukung untuk lebih mencerminkan perubahan kondisi saat ini. Metode dan pendekatan akan terus dimonitor dan diperbaharui jika terdapat tambahan informasi yang wajar, terdukung, dan tersedia; termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) dan masukan lainnya.

(e) Pendapatan

(i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)**

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(e) Pendapatan (lanjutan)

- (i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan (lanjutan)

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan / atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika.

- (ii) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan. Grup menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis.

- (f) Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan *goodwill*

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ad. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting (lanjutan)**

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(g) Akuisisi (lanjutan)

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan *goodwill*. Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuisisi akuntansi atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi, dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KAS DAN SETARA KAS**

	Mata uang	2020		2019	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas	Rp	-	19	-	37
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Rp	-	1.559	-	1.407
	US\$	8	110	9	122
	EUR	2	28	1	23
	JPY	1	0	1	0
	HKD	2	3	0	1
	AUS\$	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Rp	-	1.129	-	1.033
	US\$	5	72	6	86
	SGD	0	0	0	0
	EUR	-	-	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	Rp	-	312	-	198
	US\$	0	6	3	44
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	Rp	-	43	-	51
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	21	-	20
	US\$	0	0	0	0
	SGD	0	0	-	-
Sub-jumlah			<u>3.283</u>		<u>2.985</u>
Pihak ketiga					
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	1,576	-	33
	US\$	0	1	0	0
	MYR	1	4	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	36	504	14	188
	HKD	5	10	6	10
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	Rp	-	218	-	3
PT Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Rp	-	155	-	121
PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata")	Rp	-	81	-	335
	US\$	1	12	4	62
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	0	-	0
	US\$	6	86	11	150
	SGD	8	81	1	7
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	260	-	401
	US\$	8	108	8	113
	MYR	13	44	4	12
	TWD	42	21	27	13
	SGD	1	15	0	3
	EUR	0	5	1	17
	AUS\$	41	5	1	7
	MOP	-	-	0	1
	HKD	-	-	0	0
Sub-jumlah			<u>3.186</u>		<u>1.476</u>
Jumlah bank			<u>6.469</u>		<u>4.461</u>
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	3.039	-	2.693
	US\$	27	385	32	450
Bank Mandiri	Rp	-	2.825	-	1.129
	US\$	14	190	16	215
BRI	Rp	-	2.421	0	2.561
	US\$	34	479	36	500
BTN	Rp	-	2.123	-	2.733
	US\$	-	-	4	49
Sub-jumlah			<u>11.462</u>		<u>10.330</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	<u>Saldo</u>		<u>Saldo</u>	
	<u>Mata uang</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Mata uang asing (dalam jutaan)</u>	<u>Setara Rupiah</u>
Deposito berjangka (lanjutan)				
Pihak ketiga				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	-	1,394
	US\$	6	-	-
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	-	400
	US\$	9	-	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")	Rp	-	0	14
	US\$	35	5	70
PT Bank Sinarmas Tbk. ("Bank Sinarmas")	Rp	-	0	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("BTPN")	Rp	-	0	1
PT Bank Danamon Tbk. ("Bank Danamon")	Rp	-	0	1
PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")	Rp	-	0	29
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	-	992
	US\$	-	29	398
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	0	43
	US\$	5	8	42
	MYR	-	9	30
Sub-jumlah		<u>2.639</u>	<u>3.414</u>	<u>3.414</u>
Jumlah deposito berjangka		14.101		13.744
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian		(0)		-
<b>Jumlah</b>		<b><u>20.589</u></b>		<b><u>18.242</u></b>

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah	2,00% - 8,25%	4,00% - 9,25%
Mata uang asing	0,25% - 2,80%	0,50% - 3,30%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank yang sehat secara finansial karena dimiliki oleh negara.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA**

		2020		2019	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	60	-	-
Bank Mandiri	US\$	20	278	-	-
BRI	Rp	-	180	-	-
BTN	US\$	5	70	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	120	-	-
Sub jumlah	US\$	14	197	-	-
Pihak ketiga					
SCB	US\$	9	126	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	US\$	-	-	8	111
Sub jumlah	Rp	-	18	-	18
Jumlah deposito berjangka	US\$	5	71	5	71
Sub jumlah			1.120		200
Rekening penampungan	Rp	-	47	-	142
Sub jumlah	US\$	2	27	1	15
Sub jumlah	MYR	-	-	6	19
Jumlah rekening penampungan			74		176
Reksa dana					
Pihak berelasi					
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW")	Rp	-	77	-	71
Sub jumlah			77		71
Lainnya (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	US\$	2	32	-	102
Sub jumlah	MYR	-	-	2	5
Jumlah lainnya			32		107
<b>Jumlah</b>			<b>1.303</b>		<b>554</b>

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	2020	2019
Rupiah	3,25% - 6,50%	6,50%
Mata uang asing	0,15% - 1,08%	1,20% - 2,51%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. PIUTANG USAHA**

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*. dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
BUMN	1.564	1.604
Indonusa	504	494
Indosat	225	150
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	407	459
Jumlah	2.700	2.707
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.056)	(915)
<b>Jumlah bersih</b>	<b>1.644</b>	<b>1.792</b>

(ii) Pihak ketiga

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pelanggan individual dan bisnis	15.095	13.710
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	1.904	1.583
Jumlah	16.999	15.293
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.304)	(5.288)
<b>Jumlah bersih</b>	<b>9.695</b>	<b>10.005</b>

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sampai dengan 3 bulan	1.356	1.563
3 sampai dengan 6 bulan	253	237
Lebih dari 6 bulan	1.091	907
Jumlah	2.700	2.707
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.056)	(915)
<b>Jumlah bersih</b>	<b>1.644</b>	<b>1.792</b>

(ii) Pihak ketiga

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sampai dengan 3 bulan	8.762	9.270
3 sampai dengan 6 bulan	1.021	1.077
Lebih dari 6 bulan	7.216	4.946
Jumlah	16.999	15.293
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.304)	(5.288)
<b>Jumlah bersih</b>	<b>9.695</b>	<b>10.005</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	2020			2019	
	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian
Belum jatuh tempo	7.818	696	8,9%	8.250	395
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	2.300	488	21,2%	2.583	513
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.274	495	38,9%	1.314	458
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	8.307	6.681	80,4%	5.853	4.837
<b>Jumlah</b>	<b>19.699</b>	<b>8.360</b>		<b>18.000</b>	<b>6.203</b>

Grup telah membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp4.217 miliar dan Rp3.942 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	2020	2019
Rupiah	2.690	2.705
Dolar A.S.	10	2
Jumlah	2.700	2.707
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.056)	(915)
<b>Jumlah bersih</b>	<b>1.644</b>	<b>1.792</b>

(ii) Pihak ketiga

	2020	2019
Rupiah	14.635	12.883
Dolar A.S.	2.265	2.298
Dolar Singapura	75	71
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	24	41
Jumlah	16.999	15.293
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(7.304)	(5.288)
<b>Jumlah bersih</b>	<b>9.695</b>	<b>10.005</b>

d. Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian

	2020	2019
Saldo awal	6.203	5.029
Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 71	(14)	-
Penyisihan yang diakui selama periode berjalan	2.362	2.283
Penghapusbukuan piutang	(191)	(1.109)
<b>Saldo akhir</b>	<b>8.360</b>	<b>6.203</b>

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang usaha tertentu entitas anak masing-masing sebesar Rp3.432 miliar Rp6.812 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19 dan 20c).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. ASET KONTRAK**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aset kontrak	1,351	-
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(112)	-
Jumlah bersih	1,239	-
<b>Jangka pendek</b>	<b>(1,036)</b>	-
<b>Jangka panjang</b>	<b>203</b>	-

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya aset kontrak.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**7. PERSEDIAAN**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Komponen	560	351
Kartu SIM dan voucher prabayar	265	154
Lain-lain	226	172
Jumlah	1.051	677
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(37)	(62)
Kartu SIM dan voucher prabayar	(28)	(28)
Lain-lain	(3)	(2)
Jumlah	(68)	(92)
<b>Jumlah bersih</b>	<b>983</b>	<b>585</b>

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Saldo awal	92	67
Provisi yang diakui selama tahun berjalan	1	25
Penghapusbukuan persediaan	(25)	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>68</b>	<b>92</b>

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp544 miliar dan Rp1.727 miliar (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, persediaan tertentu entitas anak masing-masing sebesar Rp557 miliar dan Rp343 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 20c).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, modul (bagian dari aset tetap) dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp107 miliar dan Rp112 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp155 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. ASET LANCAR LAINNYA**

Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka (Catatan 36c.i)	4.554	3.879
Uang muka	1.339	670
Sewa dibayar di muka	259	1.403
Gaji dibayar di muka	180	189
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	229	550
<b>Jumlah</b>	<b>6.561</b>	<b>6.691</b>

**9. BIAYA KONTRAK**

Rincian dari biaya kontrak adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>		<b>Jumlah</b>
	<b>Biaya perolehan kontrak</b>	<b>Biaya pemenuhan kontrak</b>	
Saldo, 31 Desember 2019	-	-	-
<b>Penyesuaian atas penerapan awal PSAK 72</b>	<b>696</b>	<b>489</b>	<b>1.185</b>
<b>Jumlah</b>	<b>696</b>	<b>489</b>	<b>1.185</b>
Saldo, 1 Januari 2020	696	489	1.185
Amortisasi selama periode berjalan	(150)	(368)	(518)
Penambahan selama periode berjalan	699	342	1.041
Saldo, 31 Desember 2020	1.245	463	1.708
<b>Jangka pendek</b>	<b>(193)</b>	<b>(261)</b>	<b>(454)</b>
<b>Jangka panjang</b>	<b>1.052</b>	<b>202</b>	<b>1.254</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA INSTRUMEN KEUANGAN**

	2020	2019
Obligasi konversi		
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ("AKAB")	2.116	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	223	333
Jumlah obligasi konversi	2.339	333
Investasi pada ekuitas	1.706	720
<b>Total</b>	<b>4.045</b>	<b>1.053</b>

Pada tanggal 16 November 2020, Telkomsel mengadakan perjanjian AKAB untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga senilai US\$150 juta (setara dengan Rp2.116 miliar pada tanggal 31 Desember 2020), yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Obligasi konversi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Investasi pada obligasi konversi ini diklasifikasikan sebagai FVTPL karena dimiliki oleh Telkomsel bukan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terhutang.

Investasi pada ekuitas termasuk investasi MDI pada beberapa perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Penambahan investasi pada tahun berjalan oleh MDI berjumlah sebesar Rp783 miliar. Investasi pada ekuitas ini diklasifikasikan sebagai FVTPL.

**11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI**

Rincian penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas untuk tahun 2020:

	2020							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
<b>Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:</b>								
Jalin <sup>a</sup>	33,00	77	-	17	(5)	(0)	-	89
Finarya <sup>b</sup>	25,00	267	28	(209)	-	1	-	87
Tiphone <sup>c</sup>	24,00	526	-	(41)	-	-	(485)	-
Indonusa <sup>d</sup>	20,00	210	-	-	-	-	(210)	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar) <sup>e</sup>		130	(33)	(13)	-	(0)	(68)	16
<b>Jumlah penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi</b>		<b>1.210</b>	<b>(5)</b>	<b>(246)</b>	<b>(5)</b>	<b>1</b>	<b>(763)</b>	<b>192</b>

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2020\*:

	Jalin	Finarya	Indonusa	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>				
Aset lancar	187	3.160	565	972
Aset tidak lancar	194	169	331	4.516
Liabilitas jangka pendek	(92)	(2.327)	(318)	(795)
Liabilitas jangka panjang	(22)	(41)	(573)	(4.398)
<b>Ekuitas (defisit)</b>	<b>267</b>	<b>961</b>	<b>5</b>	<b>295</b>
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>				
Pendapatan	277	133	783	1.278
Beban operasional	(205)	(948)	(691)	(1.035)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(3)	69	(24)	(92)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	69	(746)	68	151
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(18)	2	(6)	(4)
<b>Laba (rugi) periode berjalan</b>	<b>51</b>	<b>(744)</b>	<b>62</b>	<b>147</b>
Laba (rugi) komprehensif lain	(1)	4	7	(27)
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan</b>	<b>50</b>	<b>(740)</b>	<b>69</b>	<b>120</b>

\* Ringkasan informasi keuangan Tiphone pada tanggal 31 Desember 2020 tidak tersedia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Rincian penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas untuk tahun 2019:

	2019							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Penurunan nilai	Saldo akhir
<b>Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:</b>								
Tiphone <sup>c</sup>	24,00	1.602	-	88	(11)	19	(1.172)	526
Finarya <sup>b</sup>	26,58	-	484	(217)	-	-	-	267
Indonusa <sup>d</sup>	20,00	210	-	-	-	-	-	210
Jalin <sup>e</sup>	33,00	-	70	7	-	(0)	-	77
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar) <sup>e</sup>		141	32	(44)	-	1	-	130
<b>Jumlah penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi</b>		<b>1.953</b>	<b>586</b>	<b>(166)</b>	<b>(11)</b>	<b>20</b>	<b>(1.172)</b>	<b>1.210</b>

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2019:

	Tiphone	Finarya	Indonusa	Jalin	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>					
Aset lancar	8.165	2.382	495	100	1.056
Aset tidak lancar	778	132	253	222	4.326
Liabilitas jangka pendek	(3.824)	(1.533)	(534)	(78)	(1.552)
Liabilitas jangka panjang	(741)	(3)	(278)	(10)	(5.343)
<b>Ekuitas (defisit)</b>	<b>4.378</b>	<b>978</b>	<b>(64)</b>	<b>234</b>	<b>(1.513)</b>
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>					
Pendapatan	28.442	38	794	205	1.205
Beban operasional	(27.621)	(877)	(738)	(148)	(1.303)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(321)	17	1	2	(159)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	500	(822)	57	59	(257)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(138)	1	(10)	(17)	(48)
<b>Laba (rugi) periode berjalan</b>	<b>362</b>	<b>(821)</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>(305)</b>
Laba (rugi) komprehensif lain	77	-	(1)	(0)	2
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan</b>	<b>439</b>	<b>(821)</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>(303)</b>

<sup>a</sup> Jalin sebelumnya adalah entitas anak. Pada tanggal 19 Juni 2019 Grup menjual 67% kepemilikan sahamnya kepada PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") senilai Rp395 miliar.

<sup>b</sup> Pada tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel mendirikan anak perusahaan PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya") dengan modal awal Rp25 miliar dan pada tanggal 22 Februari 2019 Telkomsel mengalihkan asetnya sebesar Rp 150 miliar. Atas akuisisi ini Telkomsel memperoleh masing-masing 2.499 dan 14.974 lembar saham (kepemilikan saham 100%). Telkomsel dengan PT Mandiri Capital Indonesia, PT BRI Ventura Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Jasamarga Tollroad Operator, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), PT Pertamina Retail, PT Kereta Commuter Indonesia ("KCI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa Capital, menandatangani perjanjian pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Oktober 2019, dan 31 Desember 2019 sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor oleh masing-masing pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2019, Telkomsel memiliki 48.530 lembar saham atau setara dengan 26,58% kepemilikan saham.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Finarya menerbitkan 13.632 saham seri B yang dimiliki oleh Grab LA Pte Ltd ("Grab") sebesar 11.237 lembar saham, PT BRI Ventura Indonesia sebesar 943 lembar saham, PT Mandiri Capital Indonesia sebesar 924 lembar saham dan Telkomsel sebesar 528 lembar saham. Investasi ini menurunkan kepemilikan Telkomsel di Finarya menjadi 25,00%.

<sup>c</sup> Tiphone berdiri pada tanggal 25 Juni 2008 dengan nama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar, termasuk didalamnya aset tak berwujud dan goodwill masing-masing sebesar Rp188 miliar dan Rp647 miliar. Pada tahun 2020, Manajemen telah mengakui penurunan nilai penuh atas investasi pada Tiphone mengingat keraguan atas kelangsungan bisnis, kondisi keuangan dan penangguhan saham yang berlaku efektif 10 Juni 2020. Manajemen telah memutuskan untuk membukukan penyisihan penuh untuk investasi di Tiphone per 31 Desember 2020.

<sup>d</sup> Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%. Berdasarkan penilaian manajemen, pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat penyisihan penurunan nilai investasi pada Indonusa.

<sup>e</sup> Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah Rp228 miliar dan Rp480 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. ASET TETAP**

	31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi /Translasi	31 Desember 2020
<b>Harga perolehan:</b>							
<b>Aset tetap pemilikan langsung</b>							
Tanah	1.644	-	1.644	157	-	(1)	1.800
Bangunan	14.062	-	14.062	201	-	1.874	16.137
Renovasi bangunan sewa	1.549	-	1.549	31	(192)	22	1.410
Peralatan sentral telepon	17.348	-	17.348	956	(1.921)	1.123	17.506
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	2.258	-	2.258	429	-	(675)	2.012
Peralatan dan instalasi transmisi	151.750	-	151.750	1.050	(3.825)	10.221	159.196
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	12.344	-	12.344	236	(2)	(2.155)	10.423
Jaringan kabel	54.357	-	54.357	8.280	(68)	(1.773)	60.796
Catu daya	20.113	-	20.113	45	(311)	1.141	20.988
Peralatan pengolahan data	16.409	-	16.409	3	(703)	1.954	17.663
Peralatan telekomunikasi lainnya	5.340	-	5.340	2.157	-	16	7.513
Peralatan kantor	2.361	-	2.361	216	(354)	(98)	2.125
Kendaraan	568	-	568	48	(104)	39	551
Peralatan lainnya	123	-	123	17	-	(72)	68
Aset dalam pembangunan	2.619	-	2.619	15.610	(8)	(15.697)	2.524
<b>Aset sewa pembiayaan</b>							
Peralatan dan instalasi transmisi	5.500	(5.500)	-	-	-	-	-
Peralatan pengolahan data	1	(1)	-	-	-	-	-
Kendaraan	503	(503)	-	-	-	-	-
Peralatan kantor	42	(42)	-	-	-	-	-
Aset CPE	22	(22)	-	-	-	-	-
Catu daya	-	-	-	-	-	-	-
Aset PBH	89	-	89	-	-	(89)	-
Jumlah	309.002	(6.068)	302.934	29.436	(7.488)	(4.170)	320.712

	31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi /Translasi	31 Desember 2020
<b>Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:</b>							
<b>Aset tetap pemilikan langsung</b>							
Bangunan	4.113	-	4.113	739	-	20	4.872
Renovasi bangunan sewa	1.091	-	1.091	158	(188)	-	1.061
Peralatan sentral telepon	11.976	-	11.976	1.569	(1.921)	(3)	11.621
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.580	-	1.580	-	-	2	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	79.993	-	79.993	11.463	(3.545)	80	87.991
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	5.809	-	5.809	900	(1)	(2.296)	4.412
Jaringan kabel	14.171	-	14.171	2.509	(66)	(636)	15.978
Catu daya	13.596	-	13.596	1.512	(309)	(42)	14.757
Peralatan pengolahan data	11.977	-	11.977	1.522	(708)	(11)	12.780
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.766	-	1.766	1.120	-	(1)	2.885
Peralatan kantor	1.678	-	1.678	375	(360)	(119)	1.574
Kendaraan	210	-	210	74	(70)	15	229
Peralatan lainnya	66	-	66	2	-	(21)	47
<b>Aset sewa pembiayaan</b>							
Peralatan dan instalasi transmisi	3.734	(3.734)	-	-	-	-	-
Peralatan pengolahan data	1	(1)	-	-	-	-	-
Kendaraan	115	(115)	-	-	-	-	-
Peralatan kantor	44	(44)	-	-	-	-	-
Aset CPE	20	(20)	-	-	-	-	-
Catu daya	-	-	-	-	-	-	-
Aset PBH	89	-	89	-	-	(89)	-
Jumlah	152.029	(3.914)	148.115	21.943	(7.168)	(3.101)	159.789
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>156.973</b>						<b>160.923</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. ASET TETAP (lanjutan)**

	1 Januari 2019	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2019
<b>Harga perolehan:</b>						
<b>Aset tetap pemilikan langsung</b>						
Tanah	1.626	6	16	-	(4)	1.644
Bangunan	11.833	12	779	(4)	1.442	14.062
Renovasi bangunan sewa	1.375	-	37	(58)	195	1.549
Peralatan sentral telepon	15.291	-	1.228	(61)	890	17.348
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.586	-	675	-	(3)	2.258
Peralatan dan instalasi transmisi	141.408	686	6.768	(6.240)	9.128	151.750
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	11.972	-	108	(11)	275	12.344
Jaringan kabel	45.451	-	8.197	(113)	822	54.357
Catu daya	17.864	-	793	(253)	1.709	20.113
Peralatan pengolahan data	14.265	10	709	(107)	1.532	16.409
Peralatan telekomunikasi lainnya	3.423	-	1.904	-	13	5.340
Peralatan kantor	2.142	7	208	(101)	105	2.361
Kendaraan	641	-	99	(167)	(5)	568
Peralatan lainnya	94	-	57	-	(28)	123
Aset dalam pembangunan	4.876	81	14.923	(20)	(17.241)	2.619
<b>Aset sewa pembiayaan</b>						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.603	-	-	(102)	(1)	5.500
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	-	1
Kendaraan	578	1	54	(80)	(50)	503
Peralatan kantor	16	-	30	(4)	-	42
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	125	-	-	-	(125)	-
Aset PBH	252	-	-	-	(163)	89
Jumlah	<u>280.444</u>	<u>803</u>	<u>36.585</u>	<u>(7.321)</u>	<u>(1.509)</u>	<u>309.002</u>

  

	1 Januari 2019	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2019
<b>Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:</b>						
<b>Aset tetap pemilikan langsung</b>						
Bangunan	3.405	-	726	(4)	(14)	4.113
Renovasi bangunan sewa	949	-	198	(56)	-	1.091
Peralatan sentral telepon	10.550	-	1.488	(45)	(17)	11.976
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.320	-	260	-	-	1.580
Peralatan dan instalasi transmisi	74.247	-	11.059	(5.260)	(53)	79.993
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	5.005	-	818	(10)	(4)	5.809
Jaringan kabel	12.185	-	2.349	(102)	(261)	14.171
Catu daya	12.316	-	1.454	(239)	65	13.596
Peralatan pengolahan data	10.747	-	1.304	(61)	(13)	11.977
Peralatan telekomunikasi lainnya	1.029	-	737	-	-	1.766
Peralatan kantor	1.312	-	383	(55)	38	1.678
Kendaraan	281	-	72	(137)	(6)	210
Peralatan lainnya	75	-	1	-	(10)	66
<b>Aset sewa pembiayaan</b>						
Peralatan dan instalasi transmisi	3.241	-	587	(94)	-	3.734
Peralatan pengolahan data	1	-	-	-	-	1
Kendaraan	126	-	72	(58)	(25)	115
Peralatan kantor	70	-	3	(3)	(26)	44
Aset CPE	20	-	-	-	-	20
Catu daya	73	-	-	-	(73)	-
Aset PBH	244	-	-	-	(155)	89
Jumlah	<u>137.196</u>	<u>-</u>	<u>21.511</u>	<u>(6.124)</u>	<u>(554)</u>	<u>152.029</u>
<b>Nilai buku bersih</b>	<b><u>143.248</u></b>					<b><u>156.973</u></b>

a. Laba dari penjualan aset tetap

	2020	2019
Hasil penjualan aset tetap	236	1.496
Nilai buku bersih	(20)	(853)
<b>Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap</b>	<b>216</b>	<b>643</b>

b. Lain-lain

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
- (ii) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp160 miliar dan Rp99 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 6,25%-11% dan 4,12%-11% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**12. ASET TETAP (lanjutan)**

b. Lain-lain (lanjutan)

- (iii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
- (iv) Pada tahun 2020 dan 2019, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp234 miliar dan Rp197 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tahun 2020 dan 2019, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp190 miliar dan Rp165 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (v) Pada tahun 2018, umur manfaat lisensi piranti lunak radio dan peralatan pengolahan data diubah masing-masing dari 7 tahun menjadi 10 tahun dan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp266 miliar dan Rp637 miliar.

Pada tahun 2020, umur manfaat menara Grup yang berada di Indonesia diubah dari 20 tahun menjadi 30 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp160 miliar. Menara disajikan sebagai bagian dari peralatan dan instalasi transmisi.

- (vi) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2070. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (vii) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp159.454 miliar dan Rp150.891 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan masing-masing sebesar Rp22.886 miliar dan Rp18.190 miliar, US\$Nihil dan US\$74 juta, HKD8 juta, SGD315 juta dan SGD269 juta, dan MYR39 juta dan *first loss basis* masing-masing sebesar Rp2.750 miliar dan Rp2.760 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.
- (viii) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah masing-masing sekitar 61,19% dan 32,39% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian masing-masing sampai dengan Maret 2023 dan November 2021. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (ix) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 20b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp14.115 miliar dan Rp11.147 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 19, 20c dan 20d).
- (x) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp63.656 miliar dan Rp60.081 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xi) Pada tahun 2020, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp41.984 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. ASET HAK-GUNA**

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, instalasi dan peralatan transmisi, catu daya, kendaraan, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam operasinya, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 1 dan 33 tahun.

Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel. Beban sewa jangka pendek sebesar Rp3.612 miliar dan sewa aset bernilai rendah sebesar Rp119 miliar dikeluarkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Nilai tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan:

	31 Desember 2019	Dampak penerapan PSAK 73	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ translasi	31 Desember 2020
<b>Harga perolehan:</b>							
Tanah	-	3.777	3.777	1.407	(322)	1	4.863
Bangunan	-	639	639	132	(8)	(29)	734
Peralatan dan instalasi transmisi	-	14.873	14.873	1.872	(674)	1	16.072
Catu daya	-	544	544	97	-	-	641
Kendaraan	-	540	540	138	(2)	-	676
Lain-lain	-	45	45	1	(1)	(16)	29
Jumlah	-	20.418	20.418	3.647	(1.007)	(43)	23.015
<b>Akumulasi amortisasi</b>							
Tanah	-	-	-	(812)	49	-	(763)
Bangunan	-	-	-	(193)	4	23	(166)
Peralatan dan instalasi transmisi	-	-	-	(3.687)	527	-	(3.160)
Catu daya	-	-	-	(200)	-	-	(200)
Kendaraan	-	-	-	(141)	-	-	(141)
Lain-lain	-	-	-	(20)	1	-	(19)
Jumlah	-	-	-	(5.053)	581	23	(4.449)
<b>Nilai buku bersih</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18.566</b>

Nilai tercatat liabilitas sewa dan rincian mutasinya adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>
Saldo, 31 Desember 2019	2.340
Penyesuaian atas penerapan PSAK 73	14.260
Saldo, 1 Januari 2020	16.600
Penambahan	3.964
Pengurangan	(4.947)
Saldo, 31 Desember 2020	15.617
<b>Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>(5.396)</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>10.221</b>

Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>
2021	6.096
2022	3.812
2023	2.887
2024	1.864
2025	1.288
Selanjutnya	1.731
Jumlah pembayaran sewa	17.678
Bunga	(2.139)
Nilai kini atas pembayaran sewa	15.539
Akrualisasi bunga	78
Jumlah liabilitas sewa	15.617
<b>Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>(5.396)</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>10.221</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Tagihan restitusi pajak - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 28b)	1.382	3.666
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 8)	1.237	1.488
Pajak dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 28a)	787	678
Beban tangguhan	498	570
Uang muka pembelian aset tetap	404	481
Setoran jaminan	168	210
Sewa dibayar di muka	-	3.170
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	357	643
<b>Jumlah</b>	<b>4.833</b>	<b>10.906</b>

**15. ASET TAKBERWUJUD**

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<b>Goodwill</b>	<b>Piranti lunak</b>	<b>Lisensi</b>	<b>Aset takberwujud lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Nilai tercatat bruto:</b>					
Saldo, 1 Januari 2020	1.432	12.480	96	1.571	15.579
Penambahan	-	2.282	3	3	2.288
Pengurangan	-	(166)	-	(74)	(240)
Reklasifikasi/translasi	(4)	92	(5)	(26)	57
Saldo, 31 Desember 2020	1.428	14.688	94	1.474	17.684
<b>Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:</b>					
Saldo, 1 Januari 2020	(29)	(8.400)	(93)	(611)	(9.133)
Beban amortisasi	-	(1.545)	(9)	(176)	(1.730)
Penurunan nilai	(104)	-	-	-	(104)
Pengurangan	-	124	-	-	124
Reklasifikasi/translasi	8	(42)	8	31	5
Saldo, 31 Desember 2020	(125)	(9.863)	(94)	(756)	(10.838)
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1.303</b>	<b>4.825</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>6.846</b>

  

	<b>Goodwill</b>	<b>Piranti lunak</b>	<b>Lisensi</b>	<b>Aset takberwujud lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Nilai tercatat bruto:</b>					
Saldo, 1 Januari 2019	1.066	10.680	94	687	12.527
Penambahan	-	1.942	4	511	2.457
Akuisisi	467	-	-	379	846
Pengurangan	(104)	(166)	(12)	(14)	(296)
Reklasifikasi/translasi	3	24	10	8	45
Saldo, 31 Desember 2019	1.432	12.480	96	1.571	15.579
<b>Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:</b>					
Saldo, 1 Januari 2019	(29)	(6.896)	(81)	(489)	(7.495)
Beban amortisasi	-	(1.165)	(357)	(145)	(1.667)
Pengurangan	-	71	2	14	87
Reklasifikasi/translasi	-	(410)	343	9	(58)
Saldo, 31 Desember 2019	(29)	(8.400)	(93)	(611)	(9.133)
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1.403</b>	<b>4.080</b>	<b>3</b>	<b>960</b>	<b>6.446</b>



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)**

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* PT Bina Data Mandiri ("BDM") (2012), Contact Centres Australia Pty. Ltd. (2014), PT Media Nusantara Data Global ("MNDG") (2015), Melon dan PT Griya Silkindo Drajatmoerni ("GSDm") (2016), TSGN dan Nutech (2017), SSI, CIP, dan Telin Malaysia (2018), dan PST (2019) (Catatan 1e).
- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2020, *goodwill* yang mengalami penurunan nilai adalah *goodwill* yang timbul dari akuisisi Sigma, Contact Centres Australia Pty. Ltd., dan *platform Tiketapasaja.com* masing-masing sebesar Rp88 miliar, Rp14 miliar, dan Rp2 miliar. Rugi penurunan nilai diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat penurunan nilai atas *goodwill*.
- (iii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing 1 - 6 tahun dan 1- 5 tahun.
- (iv) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp7.077 miliar dan Rp5.526 miliar.

**16. UTANG USAHA**

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	678	683
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	250	136
<b>Sub-jumlah</b>	<b><u>928</u></b>	<b><u>819</u></b>
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	11.953	10.634
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	2.914	1.070
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")	1.204	1.374
<b>Sub-jumlah</b>	<b><u>16.071</u></b>	<b><u>13.078</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>16.999</u></b>	<b><u>13.897</u></b>

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rupiah	14.895	12.027
Dolar A.S.	2.012	1.823
Lain-lain	92	47
<b>Jumlah</b>	<b><u>16.999</u></b>	<b><u>13.897</u></b>

Syarat dan ketentuan atas kewajiban keuangan di atas:

1. Utang usaha tidak dikenakan bunga dan secara umum diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.
2. Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi pihak berelasi.
3. Lihat Catatan 38b.v untuk manajemen risiko likuiditas Grup.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	8.455	8.450
Gaji dan tunjangan	3.399	2.412
Umum, administrasi, dan pemasaran	2.255	2.658
Beban bunga dan administrasi bank	156	216
<b>Jumlah</b>	<b>14.265</b>	<b>13.736</b>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**18. LIABILITAS KONTRAK**

a. Liabilitas kontrak jangka pendek

	2020	2019
Uang muka pelanggan Mobile	5.047	5.161
Uang muka pelanggan Enterprise	1.884	1.250
Uang muka pelanggan WIB	668	695
Uang muka pelanggan Consumer	111	76
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	124	170
<b>Jumlah</b>	<b>7.834</b>	<b>7.352</b>

b. Liabilitas kontrak jangka panjang

	2020	2019
Uang muka pelanggan Consumer	588	389
Uang muka pelanggan WIB	345	327
Uang muka pelanggan Enterprise	68	83
Lain-lain	3	4
<b>Jumlah</b>	<b>1.004</b>	<b>803</b>

Saldo liabilitas kontrak pada tanggal 31 Desember 2019, disajikan sebagai pendapatan diterima di muka di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN**

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	2020		2019	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal	Setara Rupiah	Mata uang asal	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
Bank Mandiri	Rp	-	2.900	-	2.400
BNI	Rp	-	897	-	1.238
PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")	Rp	-	-	-	17
Sub-jumlah			3.797		3.655
Pihak ketiga					
MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")	Rp	-	2.611	-	1.705
HSBC	Rp	-	2.304	-	1.754
	US\$	0	4	0	4
Bank DBS	Rp	-	573	-	722
	US\$	1	13	1	13
PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia")	Rp	-	200	-	500
BTPN	Rp	-	110	-	-
SCB	Rp	-	100	-	150
Bank CIMB Niaga	Rp	-	78	-	78
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	Rp	-	73	-	124
	US\$	5	71	-	-
Sub-jumlah			6.137		5.050
<b>Jumlah</b>			<b>9.934</b>		<b>8.705</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)**

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
<b>Mandiri</b> 2019 - 2020	Perusahaan, Fynet	Rp	2.900	28 April 2021 - 21 November 2021	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 1,50% 3 bulan JIBOR + 0,60%	Tidak ada
<b>BNI</b> 2014 - 2017	GSD, Sigma <sup>a</sup> , TLT	Rp	615	9 Januari 2021 - 7 November 2021	Bulanan	7,90% - 9,00%	Piutang usaha dan aset tetap
2014 - 2020	Telkom Infratel, Infomedia <sup>b</sup> , Sigmah, Metranet	Rp	1.455	9 Januari 2021 - 19 Desember 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,20% - 2,50%	Piutang usaha dan aset tetap
<b>MUFG Bank</b> 2018 - 2020	Perusahaan, Infomedia, Metra, GSD, Telkom Infratel	Rp	2.660	22 Januari 2021 - 27 September 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
<b>HSBC</b> 2018	Sigma <sup>c,h</sup>	Rp	600	15 Juli 2021	Bulanan	Under BLR 8,75%	Piutang usaha
2018	Sigma <sup>c,h</sup>	US\$	0,004	15 Juli 2021	Bulanan	Under BLR 9,13%	Piutang usaha
2018 - 2020	Perusahaan, Sigma, Melon, Metra, MD Media, PINS, Metranet	Rp	2.850	23 Januari 2021 - 31 Desember 2021	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 0,70% - 0,90% 3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada
<b>DBS</b> 2016	Nutech	Rp	4	13 Oktober 2021	Bulanan	9,00%	Tidak ada
2016	Sigma <sup>d,e</sup>	US\$	0,02	31 Juli 2021	Semesteran	3,25% (US\$), 10,75% (Rp)	Piutang usaha
2018	Telkom Infratel, Infomedia	Rp	600	31 Juli 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70% - 1,45%	Tidak ada
<b>UOB Indonesia</b> 2016	Fynet <sup>f</sup>	Rp	500	31 Maret 2021	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
<b>BTPN</b> 2020	PINS	Rp	250	13 Maret 2021	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
<b>SCB</b> 2019	GSD <sup>g</sup>	Rp	150	17 Januari 2021	Bulanan	Cost of fund + 2,00%	Tidak ada
<b>Bank CIMB Niaga</b> 2013	GSD <sup>h</sup>	Rp	85	1 Januari 2021	Bulanan	10,90% - 11,50%	Piutang usaha dan aset tetap

\* Disajikan dalam mata uang asal.

\*\* Lihat Catatan 5 dan Catatan 12 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijamin.

<sup>a</sup> Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 23 April 2019.

<sup>b</sup> Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

<sup>c</sup> Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 16 Juli 2018.

<sup>d</sup> Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 5 Desember 2018.

<sup>e</sup> Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

<sup>f</sup> Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 Desember 2020.

<sup>g</sup> Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 18 Januari 2019.

<sup>h</sup> Perpanjangan otomatis jika belum dilunasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)**

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Pada tanggal 27 Maret 2020, Perusahaan, Metra, Infomedia, dan TII menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp600 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp230 miliar.

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp900 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp19,1 miliar.

Pada tanggal 24 Agustus 2020, Perusahaan, Sigma, dan Melon menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan HSBC sebesar Rp700 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp19,5 miliar.

Pada tanggal 27 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Permata dengan jumlah fasilitas sebesar Rp400 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 1 Oktober 2020, Perusahaan, Infomedia, MD Media, dan Telkom Infratel menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan MUFG Bank sebesar Rp1.560 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp200 miliar.

Pada tanggal 7 Oktober 2020, Perusahaan, Infomedia, dan Telkom Infratel menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank DBS sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp525 miliar.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank of China dengan jumlah fasilitas sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 9 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Citibank dengan jumlah fasilitas sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 16 November 2020, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri sebesar Rp4.400 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp2.000 miliar.

Pada tanggal 27 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan HSBC dengan jumlah fasilitas sebesar Rp500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp200 miliar.

Pada tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan, Metra, MD Media, Metranet dan Telkomsat menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan HSBC sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan sebesar Rp216 miliar.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap anak perusahaan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk Sigma, Telkom Infratel, dan PINS. *Waiver* dari BNI, BCA, dan BTPN diterima masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020, 29 Desember 2020, dan 7 Januari 2021.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan modal kerja.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)**

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	2020	2019
Pinjaman penerusan ( <i>two-step loans</i> )	20a	184	194
Obligasi dan wesel bayar	20b	478	2.491
Utang bank	20c	7.648	5.434
Pinjaman lainnya	20d	1.040	627
<b>Jumlah</b>		<b>9.350</b>	<b>8.746</b>

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA**

	Catatan	2020	2019
Pinjaman penerusan ( <i>two-step loans</i> )	20a	384	542
Obligasi dan wesel bayar	20b	6.991	7.467
Utang bank	20c	20.581	21.171
Pinjaman lainnya	20d	2.605	3.113
<b>Jumlah</b>		<b>30.561</b>	<b>32.293</b>

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2022	2023	2024	2025	
Pinjaman penerusan ( <i>two-step loans</i> )	20a	384	148	131	105	-	-
Obligasi dan wesel bayar	20b	6.991	2.199	-	-	2.097	2.695
Utang bank	20c	20.581	5.193	4.831	4.210	2.993	3.354
Pinjaman lainnya	20d	2.605	1.041	1.052	512	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>30.561</b>	<b>8.581</b>	<b>6.014</b>	<b>4.827</b>	<b>5.090</b>	<b>6.049</b>

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	2020		2019	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	3.072	418	3.839	491
	US\$	4	59	9	120
	Rp	-	91	-	125
<b>Jumlah</b>			<b>568</b>		<b>736</b>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19b)			(184)		(194)
<b>Bagian jangka panjang</b>			<b>384</b>		<b>542</b>

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,50%

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)**

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*) (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

b. Obligasi dan wesel bayar

<b>Obligasi dan wesel bayar</b>	<b>Mata uang</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Saldo terutang</b>	<b>Saldo terutang</b>
<b>Obligasi</b>			
2010			
Seri B	Rp	-	1,995
2015			
Seri A	Rp	2,200	2,200
Seri B	Rp	2,100	2,100
Seri C	Rp	1,200	1,200
Seri D	Rp	1,500	1,500
<b>Wesel bayar jangka menengah</b>			
<b>(Medium term notes atau "MTN")</b>			
MTN I Telkom Tahun 2018			
Seri B	Rp	-	200
Seri C	Rp	296	296
MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018			
Seri B	Rp	-	296
Seri C	Rp	182	182
Jumlah		7,478	9,969
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(9)	(11)
Jumlah		7,469	9,958
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)		(478)	(2,491)
<b>Bagian jangka panjang</b>		<b>6,991</b>	<b>7,467</b>

i. Obligasi

**Tahun 2010**

<b>Obligasi</b>	<b>Pokok utang</b>	<b>Penerbit</b>	<b>Tempat pencatatan</b>	<b>Tanggal terbit</b>	<b>Jatuh tempo</b>	<b>Periode pembayaran bunga</b>	<b>Tingkat bunga per tahun</b>
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 12b.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas ("Bahana"), PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank CIMB Niaga. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi pada tanggal 26 September 2018, wali amanat obligasi berganti menjadi BTN.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)**

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

**Tahun 2010 (lanjutan)**

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi, dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan sistem satelit) dan optimasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline* dan *wireless*).

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

**Tahun 2015**

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
<b>Total</b>	<b>7.000</b>						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 12b.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *broadband*, *backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *information technology application and support*, dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 31 Desember 2020, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)**

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar

**MTN I Telkom Tahun 2018**

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
Seri A	Rp	262	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	7,25%	Seluruh aset
Seri B	Rp	200	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	8,00%	Seluruh aset
Seri C	Rp	296	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	8,35%	Seluruh aset
		<u>758</u>					

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* ("MTN") I Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 24 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp758 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi regular di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*.

Pada tanggal 31 Desember 2020 peringkat MTN yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (Triple A).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

**MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018**

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode imbalan</u>	<u>Cicilan imbalan per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
Seri A	Rp	264	4 September 2018	14 September 2019	Kuartalan	19	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri B	Rp	296	4 September 2018	4 September 2020	Kuartalan	24	Hak manfaat obyek Ijarah
Seri C	Rp	182	4 September 2018	4 September 2021	Kuartalan	15	Hak manfaat obyek Ijarah
		<u>742</u>				<u>58</u>	

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN Syariah Ijarah Telkom Tahun 2018 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 26 tanggal 31 Agustus 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan menerbitkan MTN Syariah Ijarah dengan keseluruhan nilai pokok MTN Syariah Ijarah yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp742 miliar yang diterbitkan secara berseri.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)**

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. Wesel bayar (lanjutan)

**MTN Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018 (lanjutan)**

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah Bahana, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BTN sebagai Agen Pemantau, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Kustodian. MTN Syariah Ijarah tersebut diterbitkan tanpa melalui transaksi reguler di bursa (*private placement*). Dana yang diperoleh dari MTN Syariah Ijarah tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan akses dan *backbone*. Objek Ijarah dari MTN Syariah Ijarah tersebut berupa jaringan telekomunikasi di wilayah D.I. Yogyakarta yaitu jaringan kabel, peralatan teknologi informasi, dan alat-alat produksi layanan telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, peringkat MTN Syariah Ijarah yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA Sy (Triple A Syariah).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

(a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.

(b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.

(c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	2020		2019	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	7.958	-	5.898
Bank Mandiri	Rp	-	6.203	-	7.611
BRI	Rp	-	2.822	-	1.758
BNI Syariah	Rp	-	43	-	52
Sub-jumlah			17.026		15.319
Pihak ketiga					
BCA	Rp	-	3.145	-	1.665
MUFG Bank	Rp	-	2.596	-	2.981
	US\$	-	-	8	108
Bank Sindikasi	Rp	-	1.326	-	1.250
	US\$	30	427	37	514
Bank DBS	Rp	-	1.378	-	770
Bank Permata	Rp	-	757	-	-
UOB Singapore	US\$	31	437	40	556
ANZ	Rp	-	374	-	440
Bank CIMB Niaga	Rp	-	307	-	439
HSBC	Rp	-	214	-	500
BTPN	Rp	-	173	-	537
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	113	-	159
Citibank	Rp	-	-	-	500
Bank of China	Rp	-	-	-	500
UOB Indonesia	Rp	-	-	-	357
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	Rp	-	-	-	9
	MYR	12	41	19	66
Sub-jumlah			11.288		11.351
Jumlah			28.314		26.670
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(85)		(65)
			28.229		26.605
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)			(7.648)		(5.434)
<b>Bagian jangka panjang</b>			<b>20.581</b>		<b>21.171</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)**

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
<b>BNI</b>								
2018	GSD	Rp	182	54	2018 - 2021	Bulanan	8,75%	Piutang usaha
2013 - 2019	Perusahaan, GSD, TLT, Sigma, Dayamitra, Telkom Infratel	Rp	9.752	1.197	2016 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 2,20% - 2,50%; 3 bulan JIBOR + 1,70% - 2,25%	Piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan seluruh aset
<b>Bank Mandiri</b>								
2017 - 2018	Perusahaan, Balebat	Rp	680	133	2018 - 2024	Bulanan, Kuartalan	8,50% - 9,00%	Piutang usaha, persediaan, dan aset tetap
2017 - 2019	Perusahaan, GSD, Dayamitra, Telkomsel <sup>a</sup>	Rp	6.138	208	2019 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 0,60% - 1,85%	Tidak ada
<b>BRI</b>								
2017 - 2019	Perusahaan, Dayamitra, GSD	Rp	3.253	236	2019 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,70% - 2,00%	Aset tetap, dan seluruh aset
<b>BCA</b>								
2017 - 2020	Perusahaan, Metra, Dayamitra, Telkom Infratel, PST	Rp	7.981	244	2017 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 2,25%	Aset tetap
<b>MUFG Bank</b>								
2016 - 2020	GSD, Metra, Dayamitra	Rp	3.700	618	2016 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,43% - 2,40%	Aset tetap
<b>Bank Sindikasi</b>								
2015 - 2020	Perusahaan, GSD, Dayamitra	Rp	4.000	500	2016 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,00% - 2,75%	Aset tetap dan Seluruh aset
2018	TII	US\$	0,09	0,007	2019 - 2025	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada
<b>DBS</b>								
2016	Nutech	Rp	6	1	2017 - 2021	Bulanan	10.00%	Piutang usaha dan aset tetap
2017 - 2020	PINS, Dayamitra, Telkomsat	Rp	1.830	191	2018 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 2,45%	Aset tetap
<b>Bank Permata</b>								
2020	Nutech	Rp	7	0,7	2020 - 2027	Bulanan	9.25%	Aset tetap
2020	Dayamitra	Rp	750	-	2021 - 2027	Kuartalan	3 Bulan JIBOR + 1,50%	Aset tetap
<b>UOB Singapore</b>								
2016	TII	US\$	0,049	0,009	2019 - 2024	Semesteran	6 bulan LIBOR + 1,25%	Tidak ada

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)**

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata Uang</u>	<u>Total fasilitas (dalam miliar)*</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan**</u>
<b>ANZ</b>								
2015 - 2020	GSD, PINS	Rp	500	66	2020 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,40% - 2,00%	Aset tetap
<b>Bank CIMB Niaga</b>								
2017 - 2019	GSD, Metra	Rp	695	125	2018 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,425 - 1,50%	Tidak ada
<b>HSBC</b>								
2020	Telkomsat	Rp	214	-	31 Desember 2021	Tahunan	12 bulan JIBOR + 0,8%	Tidak ada
<b>BTPN</b>								
2017 - 2019	GSD, Metra, Dayamitra, TII	Rp	559	97	2018 - 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,435% - 1,50%	Tidak ada
<b>ICBC</b>								
2017	GSD	Rp	272	45	2017 - 2024	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,36%	Piutang usaha dan aset tetap

\* Disajikan dalam mata uang asal

\*\* Lihat Catatan 5, Catatan 7, dan Catatan 12 untuk piutang usaha, persediaan, dan aset tetap yang dijamin.

<sup>a</sup> Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Desember 2020, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra, dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN, MUFG Bank, ANZ, dan bank sindikasi (BCA dan BNI) dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp750 miliar, Rp500 miliar, dan Rp3.000 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 2 Agustus 2016, Dayamitra dan Telkom Akses dimasukkan sebagai peminjam ke perjanjian fasilitas kredit BTPN dan MUFG Bank, serta mengecualikan GSD dari perjanjian tersebut. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 13 Maret 2017, PINS dimasukkan sebagai salah satu peminjam dalam perjanjian fasilitas kredit ANZ. Pada tahun 2017, PINS melakukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp200 miliar.

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Dayamitra, Sigma, GSD, dan TII menandatangani perjanjian kredit dengan BRI, BNI, dan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp2.005 miliar, dan Rp1.500 miliar.

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, Metra, Dayamitra, PINS, dan Telkomsat menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, BTPN, Bank DBS, Bank CIMB Niaga, dan BCA, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp400 miliar, Rp400 miliar, Rp850 miliar, Rp495 miliar, dan Rp850 miliar. Berdasarkan amandemen pada tanggal 29 Juni 2017, BCA setuju Telkom Infratel menggantikan PINS selaku debitur yang dapat melakukan penarikan kredit.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)**

c. Utang bank (lanjutan)

Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan dan TII menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas Perusahaan sebesar Rp775 miliar.

Pada tanggal 27 Maret 2018 dan 23 Mei 2019, Perusahaan dan Dayamitra menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank dan BRI, dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp800 miliar, dan Rp200 miliar.

Pada tanggal 15 Januari 2019, Perusahaan, Infomedia, TII, Telkom Infratel, Telkomsat, dan Sigma menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas sebesar Rp628 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang tidak digunakan dari BTPN sebesar Rp538 miliar.

Pada tanggal 19 Juni 2019, Perusahaan dan Dayamitra menandatangani perjanjian dengan BNI dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.160 miliar dan Rp840 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, semua fasilitas sudah digunakan.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan jumlah fasilitas sebesar Rp4.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan dari BCA sebesar Rp2.500 miliar.

Pada tanggal 16 November 2020, Perusahaan, Dayamitra, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian dengan Bank Mandiri dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.400 miliar, Rp1.113 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp136,1 miliar.

Pada tanggal 4 Desember 2020, Perusahaan dan Admedika menandatangani perjanjian kredit dengan BTPN dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp1.500. Pada tanggal 31 Desember 2020, semua fasilitas belum digunakan.

Pada tanggal 11 Desember 2020, Perusahaan, PINS, dan GSD menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp500 miliar, Rp300 miliar, dan Rp200 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang belum digunakan dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp908 miliar.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman atas tidak terpenuhinya rasio-rasio keuangan untuk posisi keuangan, Sigma, Telkom Infratel, dan GSD. *Waiver* dari BNI, HSBC, BCA, Bank Mandiri, dan ICBC masing-masing diterima pada tanggal 28 Desember 2020, 29 Desember 2020, dan 31 Desember 2020.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)**

d. Pinjaman lainnya

<b>Kreditur</b>	<b>Mata uang</b>	<b>Saldo terutang</b>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
PT Sarana Multi Infrastruktur	Rp	3.652	3.748
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(7)	(8)
Jumlah		3.645	3.740
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 19b)		(1.040)	(627)
<b>Bagian jangka panjang</b>		<b>2.605</b>	<b>3.113</b>

Informasi lain yang signifikan terkait pinjaman lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>Peminjam</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Total fasilitas (dalam miliar)</b>	<b>Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)</b>	<b>Jadwal pembayaran</b>	<b>Tingkat suku bunga per tahun</b>	<b>Jaminan</b>
<b>PT Sarana Multi Infrastruktur</b>							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	220	Semesteran (2019 - 2023)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
29 Maret 2019	Perusahaan	Rp	2.836	350	Kuartalan (2020 - 2024)	8,49%	Tidak ada
12 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	700	100	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR + 1,85%	Aset tetap
29 Maret 2017	Dayamitra	Rp	600	514	Semesteran (2018-2024)	3 bulan JIBOR + 1,85%	Aset tetap
29 Maret 2019	Telkomsat	Rp	164	11	Semesteran (2020-2024)	8,49%	Tidak ada

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan, Dayamitra, dan Telkomsat diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1, kecuali Dayamitra tidak lebih dari 5:1
- (b) *Net Debt to EBITDA* tidak lebih dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal 125%, kecuali Dayamitra minimal 100%

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan, Dayamitra, dan Telkomsat telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan, Telkomsat, dan Telkom Infratel menandatangani amandemen perjanjian kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan jumlah fasilitas masing-masing sebesar Rp2.836 miliar, Rp164 miliar, dan RpNil. Pada tanggal 31 Desember 2020, fasilitas yang tidak digunakan dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp106 miliar.

**21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI**

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	17.879	17.221
GSD	232	230
Metra	135	130
TII	116	108
<b>Jumlah</b>	<b>18.362</b>	<b>17.689</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) tahun berjalan entitas anak:		
Telkomsel	8.771	9.029
Metra	(2)	(53)
TII	3	(5)
GSD	(13)	(42)
<b>Jumlah</b>	<b>8.759</b>	<b>8.929</b>

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dibawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

*Ringkasan laporan posisi keuangan*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aset lancar	19.488	18.657
Aset tidak lancar	84.164	64.073
Liabilitas jangka pendek	(28.997)	(20.892)
Liabilitas jangka panjang	(23.568)	(12.629)
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>51.087</b>	<b>49.209</b>
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	33.208	31.988
Kepentingan nonpengendali	17.879	17.221

*Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pendapatan	87.103	91.088
Beban operasi	(55.894)	(56.097)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	341	(389)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>31.550</b>	<b>34.602</b>
Beban pajak penghasilan - bersih	(6.488)	(8.803)
<b>Laba tahun berjalan dari operasi yang masih berlanjut</b>	<b>25.062</b>	<b>25.799</b>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih	(1.054)	(424)
<b>Jumlah laba komprehensif tahun berjalan</b>	<b>24.008</b>	<b>25.375</b>
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	8.771	9.029
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	7.725	8.490

*Ringkasan laporan arus kas*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kegiatan operasi	39.758	41.515
Kegiatan investasi	(10.923)	(13.448)
Kegiatan pendanaan	(28.277)	(25.943)
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	<b>558</b>	<b>2.124</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. MODAL SAHAM**

Keterangan	2020		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	3.839.380.280	3,88	192
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Budi Setyawan Wijaya	275.000	0	0
Dian Rachmawan	120.222	0	0
Afriwandi	42.500	0	0
Herlan Wijanarko	42.500	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	43.618.813.083	44,03	2.181
<b>Jumlah</b>	<b>99.062.216.600</b>	<b>100,00</b>	<b>4.953</b>

Keterangan	2019		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham Seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	4.601.837.380	4,65	230
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Harry Mozarta Zen	474.692	0	0
Faizal Rochmad Djoemadi	126.800	0	0
Bogi Witjaksono	55.000	0	0
Edi Witjara	32.500	0	0
Siti Choiriana	540	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	42.856.179.173	43,26	2.143
<b>Jumlah</b>	<b>99.062.216.600</b>	<b>100,00</b>	<b>4.953</b>

\* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

**23. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA**

	2020	2019
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	583	568
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	5	54
Selisih transaksi akuisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(637)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	37	37
<b>Jumlah</b>	<b>374</b>	<b>408</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**24. PENDAPATAN**

2020	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon	19.427	1.065	845	273	-	21.610
Pendapatan Interkoneksi	410	-	-	7.276	-	7.686
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	59.502	-	-	-	-	59.502
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	10	8.069	1.665	-	9.744
SMS	4.377	-	440	-	-	4.817
Lain-lain	-	42	939	632	140	1.753
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	63.879	52	9.448	2.297	140	75.816
Pendapatan jaringan	4	-	766	919	-	1.689
Pendapatan Indihome	-	19.827	2.387	-	-	22.214
Layanan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	1.291	1	-	1.292
Call center service	-	-	775	70	-	845
E-health	-	-	549	-	-	549
E-payment	-	-	475	-	24	499
Penjualan periferal	-	-	0	-	-	0
Lain-lain	-	51	1.187	393	354	1.985
Jumlah layanan lainnya	-	51	4.277	464	378	5.170
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	83.720	20.995	17.723	11.229	518	134.185
Pendapatan dari transaksi Jessor	-	-	-	2.277	-	2.277
Jumlah pendapatan	83.720	20.995	17.723	13.506	518	136.462
Penyesuaian dan eliminasi	-	(38)	6	(5)	(299)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	83.720	20.957	17.729	13.501	219	-
2019	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon	24.978	1.541	1.172	287	-	27.978
Pendapatan Interkoneksi	576	-	-	5.710	-	6.286
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	55.675	-	-	-	-	55.675
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	31	7.656	1.340	-	9.027
SMS	6.664	-	399	-	-	7.063
Lain-lain	-	-	558	380	85	1.023
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	62.339	31	8.613	1.720	85	72.788
Pendapatan jaringan	4	1	917	926	-	1.848
Pendapatan Indihome	-	16.083	2.242	-	-	18.325
Layanan lainnya						
Manage service dan terminal	-	-	1.731	1	-	1.732
Sewa menara telekomunikasi	-	-	-	1.239	-	1.239
Penjualan periferal	-	-	1.109	-	-	1.109
Call center service	-	-	651	149	-	800
E-payment	-	-	453	-	113	566
E-health	-	-	523	-	-	523
Lain-lain	-	67	1.293	580	433	2.373
Jumlah layanan lainnya	-	67	5.760	1.969	546	8.342
Jumlah pendapatan	87.897	17.723	18.704	10.612	631	135.567
Penyesuaian dan eliminasi	-	(17)	(3)	(3)	(434)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	87.897	17.706	18.701	10.609	197	-

Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 akan diakui sebagai pendapatan selama periode-periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 31 Desember 2020, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun adalah sebesar Rp8.070 miliar dan bagian yang lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp9.585 miliar.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa yang tidak dapat dibatalkan sebagai lessor. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan. Sewa ini memiliki jangka waktu antara 1 hingga 10 tahun. Semua sewa termasuk klausul untuk memungkinkan revisi atas biaya sewa setiap tahun sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Penyewa juga diharuskan untuk memberikan jaminan nilai residu pada properti yang disewa.

Tidak ada pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**25. BEBAN KARYAWAN**

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gaji dan tunjangan	8.272	7.945
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	4.321	3.538
Beban pensiun berkala, bersih (Catatan 31)	804	840
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 32)	290	290
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Catatan 31)	258	136
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih (Catatan 31)	253	167
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 31)	81	33
Beban imbalan tunjangan masa kerja (Catatan 31)	53	-
Lain-lain	58	63
<b>Jumlah</b>	<b>14.390</b>	<b>13.012</b>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**26. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI**

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Operasi dan pemeliharaan	19.930	24.410
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 36c.i)	5.930	5.736
Sewa sirkuit dan CPE	3.371	4.793
Beban hak penyelenggaraan dan KPU	2.411	2.370
Listrik, gas, dan air	946	1.102
Manajemen proyek	538	463
Beban pokok penjualan kartu SIM dan voucher (Catatan 7)	487	618
Asuransi	378	246
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	343	466
Beban pokok penjualan periferal (Catatan 7)	57	1.109
Sewa menara	17	641
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	185	272
<b>Jumlah</b>	<b>34.593</b>	<b>42.226</b>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	2.267	2.283
Beban umum	1.805	1.653
Jasa profesional	981	793
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	308	461
Perjalanan	275	410
Sumbangan sosial	223	200
Beban penagihan	193	176
Rapat	184	276
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	275	444
<b>Jumlah</b>	<b>6.511</b>	<b>6.696</b>

Lihat Catatan 33 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. PERPAJAKAN**

a. Pajak dibayar di muka

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Perusahaan:		
PPh		
PPh Badan	363	-
Pasal 22 - Pembelian barang	2	6
Pasal 23 - Penyerahan jasa	124	90
PPN	787	678
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	420	-
Pasal 4 (2) - Pajak final	6	13
Pasal 23 - Penyerahan jasa	-	2
PPN	2.255	2.458
Jumlah pajak dibayar di muka	3.957	3.247
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>(3.170)</b>	<b>(2.569)</b>
<b>Bagian jangka panjang (Catatan 14)</b>	<b>787</b>	<b>678</b>

b. Tagihan restitusi pajak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Perusahaan:		
PPh Badan	102	406
PPN	428	2.046
Entitas anak:		
PPh		
PPh Badan	933	992
Pasal 23 - Penyerahan jasa	17	44
PPN	756	1.170
Jumlah tagihan restitusi pajak	2.236	4.658
<b>Bagian jangka pendek</b>	<b>(854)</b>	<b>(992)</b>
<b>Bagian jangka panjang (Catatan 14)</b>	<b>1.382</b>	<b>3.666</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

c. Utang pajak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Perusahaan:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	53	43
Pasal 21 - PPh pribadi	119	101
Pasal 22 - Pembelian barang	5	7
Pasal 23 - Penyerahan jasa	21	38
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	-	6
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	7	9
Pasal 29 - PPh Badan	814	1.059
PPN atas Pemungutan Pajak ("WAPU")	490	487
	<u>1.509</u>	<u>1.750</u>
Entitas anak:		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	136	153
Pasal 21 - PPh pribadi	176	108
Pasal 22 - Pembelian barang	4	3
Pasal 23 - Penyerahan jasa	55	80
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	3	7
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	7	5
Pasal 29 - PPh Badan	474	473
PPN	349	852
	<u>1.204</u>	<u>1.681</u>
<b>Jumlah utang pajak</b>	<b><u>2.713</u></b>	<b><u>3.431</u></b>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kini		
Perusahaan	1.976	1.272
Entitas anak	7.822	9.347
	<u>9.798</u>	<u>10.619</u>
Tangguhan		
Perusahaan	10	(82)
Entitas anak	(596)	(221)
	<u>(586)</u>	<u>(303)</u>
<b>Beban pajak penghasilan bersih</b>	<b><u>9.212</u></b>	<b><u>10.316</u></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	38.775	37.908
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	25.861	23.555
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	64.636	61.463
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(40.285)	(41.390)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	24.351	20.073
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(395)	(515)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	23.956	19.558
<b>Perbedaan temporer:</b>		
Provisi penurunan nilai piutang	916	641
Provisi imbalan karyawan	314	74
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	29	48
Pendapatan instalasi tanggungan	234	2
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(110)	(348)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(576)	(309)
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	27	(20)
Sewa pembiayaan	6	(7)
Kapitalisasi biaya kontrak	155	-
Jumlah perbedaan temporer - bersih	995	81
<b>Perbedaan tetap:</b>		
Imbalan karyawan	145	225
Sumbangan	204	212
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	253	167
Beban untuk mendapatkan pendapatan obyek PPh final	125	133
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(15.432)	(13.911)
Pendapatan lain-lain dari hasil pemeriksaan pajak	(157)	(483)
Lain-lain	51	25
Jumlah perbedaan tetap - bersih	(14.811)	(13.632)
<b>Penghasilan kena pajak - Perusahaan</b>	<b>10.140</b>	<b>6.007</b>
Beban pajak penghasilan kini	1.927	1.201
Beban pajak penghasilan final	48	70
Beban pajak penghasilan kini atas pemeriksaan pajak	1	1
Jumlah beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	1.976	1.272
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	7.822	9.347
<b>Jumlah beban pajak penghasilan kini</b>	<b>9.798</b>	<b>10.619</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 19% (2020) dan 20% (2019) terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	38.775	37.908
Dikurangi: pendapatan yang dikenakan pajak final – bersih konsolidasian	(1.675)	(1.138)
	<u>37.100</u>	<u>36.770</u>
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif Perusahaan	7.049	7.354
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	906	1.557
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	473	764
Beban pajak penghasilan final	51	73
Perubahan tarif pajak (Perppu No. 1 Tahun 2020)	210	-
Pajak tangguhan yang tidak diakui	201	323
Lain-lain	322	245
<b>Beban pajak penghasilan bersih</b>	<b><u>9.212</u></b>	<b><u>10.316</u></b>

Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 menerapkan peraturan di bawah Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 56/2015 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, sehingga untuk perhitungan pajak kini dan tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5%.

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2/2020, yang antara lain mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% untuk tahun pajak 2022. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan PP No. 30/2020 tentang Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang mengatur pemberian tarif pajak sebesar 3% lebih rendah untuk wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal, dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang telah dipersyaratkan, sehingga untuk perhitungan beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 3%.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 19% dan 20% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% dan 25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini di atas dalam SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2020 kepada Otoritas Pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

e. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

PPH dan PPN Tahun 2011

Pada tanggal 21 Oktober 2014, Perusahaan menerima SKPKB dari Otoritas Pajak untuk tahun pajak 2011. Berdasarkan SKPKB tersebut, Perusahaan menerima SKPKB PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2011 senilai Rp182,5 miliar (termasuk denda Rp60 miliar) dan SKPKB PPh Badan senilai Rp2,8 miliar (termasuk denda Rp929 juta). Bagian yang telah diterima senilai Rp4,7 miliar (termasuk denda Rp2 miliar) atas SKPKB PPN telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN interkoneksi *international incoming call* senilai Rp177,9 miliar (termasuk denda Rp58 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak.

Pada tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan telah mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2015, Otoritas Pajak telah menerbitkan putusan penolakan keberatan. Sebagai tanggapan atas putusan keberatan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2016, Perusahaan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas penolakan keberatan terhadap pemeriksaan atas PPN interkoneksi *international incoming call*.

Pada tanggal 4 dan 5 April 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan tertanggal 20 Maret 2017 atas proses banding terkait PPN interkoneksi *international incoming call*. Dalam putusannya, dinyatakan bahwa transaksi atas PPN interkoneksi *international incoming call* adalah penyerahan jasa kena pajak dan dikategorikan sebagai ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011 senilai Rp73,9 miliar. Pengadilan Pajak menolak banding yang diajukan oleh Perusahaan untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011 senilai Rp104 miliar, dikarenakan Perusahaan dianggap tidak memenuhi ketentuan formal. Atas putusan penolakan tersebut, pada tanggal 19 dan 21 Juni 2017, Perusahaan mengajukan memori peninjauan kembali. Pada bulan Mei 2017, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi pajak untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011 senilai Rp73,9 miliar yang dikompensasi dengan STP 2013 dan 2014 masing-masing senilai Rp59,9 miliar dan Rp14 miliar.

Pada bulan Mei s.d. September dan November 2019, Perusahaan telah menerima putusan Mahkamah Agung yang diputuskan pada bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September 2019, dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Perusahaan atas masa pajak Februari, Maret, dan Mei s.d. Agustus 2011, serta menolak permohonan peninjauan kembali Otoritas Pajak atas masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Pada tanggal 21 Agustus 2019, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi pajak untuk masa pajak Maret, Mei, dan Juni 2011 senilai Rp44 miliar. Atas putusan masa pajak April 2011 yang diputuskan pada bulan April 2019, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Perusahaan dan putusan tersebut sudah diunggah melalui laman Mahkamah Agung.

Pada tanggal 24 Januari dan 31 Maret 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi pajak untuk masa pajak Februari, Agustus, April, dan Juli 2011 senilai Rp59 miliar. Dengan demikian, Perusahaan telah menerima seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung serta telah menerima seluruh pengembalian atas restitusi pajak untuk seluruh masa pajak tahun 2011.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2012. Pada tanggal 3 November 2016, Otoritas Pajak menerbitkan SKPKB PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), SKPKB PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), SKPKB PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), SKPKB PPN WAPU senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), SKPKB PPh Final Pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), SKPKB PPh Pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), dan SKPKB PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64 miliar). Perusahaan telah menyetujui senilai Rp35,2 miliar terkait perhitungan kembali pengkreditan pajak masukan atas penyelenggaraan jasa interkoneksi *international incoming call*, Rp613,3 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh Pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016. Pada tanggal 16 November 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan lainnya.

Pada tanggal 1 Maret 2017 dan 9 Mei 2017, Perusahaan menerima surat keputusan dari Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp1,8 juta (termasuk denda Rp0,6 juta) dan kurang bayar PPN WAPU senilai Rp4,4 miliar (termasuk denda Rp1,4 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, Perusahaan menerima keputusan tersebut. Pada tanggal 19 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Perusahaan dimana Otoritas Pajak telah mengurangi kurang bayar atas PPh Badan dan menambah kurang bayar atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 26 dengan rincian kurang bayar Pajak Pasal 21 senilai Rp20,7 miliar (termasuk denda Rp6,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 21 Final senilai Rp23,8 miliar (termasuk denda Rp7,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 23 senilai Rp115,7 miliar (termasuk denda Rp37,5 miliar), kurang bayar PPh Pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64,1 miliar), dan kurang bayar PPh Badan senilai Rp496,4 miliar (termasuk denda Rp161 miliar). Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Otoritas pajak menerbitkan surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan untuk PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2012 dimana Direktorat Jenderal Pajak telah menambahkan dan mengurangi jumlah kurang bayar yang masih harus dibayar oleh Perusahaan senilai Rp429,3 miliar (termasuk denda Rp141,2 miliar).

Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding dan telah menempuh serangkaian sidang banding. Pada bulan September 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan (pembetulan) atas keberatan yang diajukan oleh Perusahaan, dimana Otoritas Pajak telah mengurangi jumlah kurang bayar atas PPN untuk masa pajak Maret, April, September, dan Desember 2012 senilai Rp9,9 miliar (termasuk denda Rp3,2 miliar). Sehingga, sampai dengan 31 Desember 2018, kurang bayar atas PPN untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2012 senilai Rp419,4 miliar (termasuk denda Rp138 miliar).

Pada tanggal 16 Desember 2019, Perusahaan menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas sengketa pajak atas semua jenis pajak tahun 2012. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan terkait pajak penghasilan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk PPh Pasal 21 senilai Rp52,4 juta (termasuk denda Rp17 juta), PPh Pasal 23 senilai Rp1,4 miliar (termasuk denda Rp0,4 miliar), PPh Pasal 26 senilai Rp802,6 juta (termasuk denda Rp260,3 juta), dan PPh Pasal 4 (2) senilai Rp1,3 juta (termasuk denda Rp0,4 juta). Untuk permohonan banding atas PPh Pasal 21 Final, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan. jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk PPh Badan senilai Rp29,6 miliar (termasuk denda Rp9,6 miliar) dan PPN senilai Rp51,1 miliar (termasuk denda Rp17,5 miliar).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2012 (lanjutan)

Selanjutnya, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding terkait PPh Badan dan PPN yang diajukan Perusahaan, sehingga Perusahaan telah menerima seluruh Salinan Putusan Banding tersebut di atas dan setuju untuk membayar kurang bayar atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Badan, dan PPN.

Pada bulan Februari 2020, Perusahaan menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas PPN Masa Desember 2012 senilai Rp115,7 miliar, dimana senilai Rp46,8 miliar dikompensasikan ke SKPKB PPN masa Januari s.d. November 2012.

Pada bulan April 2020, Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas PPN Masa Januari s.d. Desember 2012. Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan STP dengan melakukan perhitungan ulang berdasarkan hasil Putusan Banding, sehingga nilai SPT yang semula Rp37,5 miliar menjadi Rp5,8 miliar. Pada bulan Juni 2020, Perusahaan menerima keputusan atas permohonan tersebut. Pada bulan Juli 2020, Perusahaan menerima realisasi pengembalian tersebut senilai Rp31,7 miliar, namun sejumlah Rp20,9 juta dikompensasikan ke utang pajak STP PPh Pasal 21 yang diterbitkan oleh beberapa Kantor Pelayanan Pajak Cabang.

Pada tanggal 6 Juli 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali untuk seluruh Putusan Banding atas seluruh sengketa pajak tahun 2012. Pada tanggal 30 Juli 2020, Perusahaan telah merespon dengan mengirimkan Kontra Memori Peninjauan Kembali untuk seluruh sengketa pajak tahun 2012.

Sampai dengan bulan Desember 2020, Mahkamah Agung telah mengumumkan hasil putusan atas proses peninjauan kembali terhadap seluruh sengketa PPh *Withholding Tax*, PPh Badan dan sebagian sengketa PPN atas masa pajak Januari s.d. Desember 2012. Dalam hasil putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak seluruh peninjauan kembali yang diajukan oleh DJP kecuali atas sengketa PPh Pasal 21 diberikan putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan atas PPN Masa Januari, Maret, Mei, dan Oktober 2012 belum diterima putusannya.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, dari seluruh perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung untuk seluruh jenis Pajak Tahun 2012, selain empat perkara berkenaan dengan jenis pajak PPN masa pajak Januari dan Mei 2012 yang telah diuraikan pada paragraf di atas yang belum diterima putusannya, Perusahaan telah menerima seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2015.

Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4,1 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55,3 miliar (termasuk denda Rp16,8 miliar). Perusahaan juga menerima STP atas PPN senilai Rp34 miliar, PPN WAPU senilai Rp7 miliar, dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPh dan PPN Tahun 2015 (lanjutan)

Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN WAPU, serta STP PPN WAPU senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017. Pada tanggal 24 Juli 2017, Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas SKPLB PPh Badan dengan keberatan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar.

Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan atas SKPLB PPh atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54,6 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Perusahaan telah menyetujui hasil proses keberatan dari Otoritas Pajak atas SKPLB PPh atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp793 juta dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan mengajukan banding.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Perusahaan menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi tambahan lebih bayar PPh Badan hasil putusan banding senilai Rp90,9 miliar.

Pada tanggal 26 Oktober 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan masih belum menerima hasil Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali DJP tersebut. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2015 selain jenis pajak PPh Badan dapat dianggap final dan berkekuatan hukum tetap karena pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini kewajiban pajak tahun 2015 tersebut telah melewati masa daluwarsa penetapan pajak sebagaimana ketentuan perundangan-undangan perpajakan.

PPh dan PPN Tahun 2016

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2016.

Pada tanggal 7 Juni 2018, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp15,3 miliar, SKPKB PPh Pasal 26 senilai Rp556,7 juta (termasuk denda Rp180,5 juta) dan SKPLB PPN senilai Rp922,7 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp15,3 miliar dan saldo tersisa senilai Rp99,1 miliar telah dibebankan sebagai pajak kini atas pemeriksaan pajak, kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp557 juta, kredit pajak PPN senilai Rp10,5 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp7,1 miliar, PPN atas pemberian cuma-cuma senilai Rp7,3 miliar, PPN atas pengalihan aset senilai Rp1,2 miliar, dan STP PPN senilai Rp1,7 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada bulan Juli 2018, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp882,7 miliar dan untuk sisa saldo senilai Rp39,9 miliar telah dikompensasikan ke STP PPN senilai Rp31,9 miliar, PPN WAPU senilai Rp7,1 miliar, PPh Pasal 23 senilai Rp556 juta, dan PPh Pasal 21 senilai Rp300 juta. Atas surat ketetapan tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2018, Perusahaan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terkait interkoneksi *international incoming call* senilai Rp151,7 miliar dan STP PPN senilai Rp30,3 miliar

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 11 Maret dan 27 Mei 2019, Otoritas Pajak menerbitkan surat putusan atas keberatan Perusahaan, dimana Otoritas Pajak mengabulkan semua keberatan Perusahaan dan menambah jumlah kelebihan bayar untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2016. Pada bulan April dan Juli 2019, Perusahaan menerima restitusi pajak senilai Rp151,7 miliar dan senilai Rp1,9 juta telah dikompensasikan ke PPh Pasal 21 untuk beberapa masa pajak. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2016 telah dianggap final dan berkekuatan hukum tetap.

PPH dan PPN Tahun 2017

Pada tanggal 6 November 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2017.

Pada tanggal 13 dan 14 November 2019, Otoritas Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp294,4 miliar dari pengajuan lebih bayar senilai Rp294,5 miliar, SKPLB PPN senilai Rp746,9 miliar dari pengajuan lebih bayar senilai Rp748,3 miliar, dan SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp1,8 miliar (termasuk denda Rp0,5 miliar). Perusahaan setuju atas koreksi pajak senilai Rp1,5 miliar yang terdiri atas PPh Badan senilai Rp0,1 miliar dan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan senilai Rp1,4 miliar. Selanjutnya, Perusahaan menerima STP dan SKPKB atas PPN WAPU masing-masing senilai Rp1,2 miliar dan Rp957 juta (termasuk denda Rp0,3 miliar). Pada tanggal 14 November 2019, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") untuk PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2).

Pada tanggal 23 dan 24 Januari 2020, Perusahaan telah menerima restitusi PPN senilai Rp746,9 miliar serta PPh Badan senilai Rp292,3 miliar dan senilai Rp2,1 miliar telah dikompensasikan ke SKPKB dan STP PPN WAPU. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2016 telah dianggap final dan berkekuatan hukum tetap.

PPH tahun 2018

Pada tanggal 17 Februari 2020, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2018. Pada tanggal 25 Februari 2020, Perusahaan telah menerima pengembalian pendahuluan atas restitusi PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018 senilai Rp979,1 miliar dan senilai Rp30,3 miliar dikompensasikan ke SKPKB PPh Badan dan pajak penghasilan tahun pajak 2012. Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menerima SKP dan STP atas hasil pemeriksaan *all taxes* tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp101,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar (termasuk denda Rp573,9 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp4 juta (termasuk denda Rp1,2 juta) dan SKPLB PPN Masa Januari s.d. Agustus dan Oktober s.d. Desember senilai Rp85,3 miliar. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan SKPKB PPN Masa September senilai Rp240,5 miliar (termasuk denda Rp59,5 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar (termasuk denda Rp4,6 miliar) dan STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima koreksi pajak pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp1,1 miliar, kurang bayar PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar, kurang bayar PPh 23 senilai Rp4 juta, kredit pajak PPN senilai Rp4,8 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar, kurang bayar PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar. Koreksi yang telah disetujui telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2020.

Perusahaan tidak menyetujui koreksi pemeriksa pajak yang mengenakan PPN atas transaksi penyerahan komponen *space segment* aset dalam konstruktif (ADK) Satelit Merah Putih kepada Telkom dan akan mengajukan upaya hukum Keberatan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima seluruh pengembalian kelebihan pajak atas PPh Badan dan PPN.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel

PPH dan PPN Tahun 2011

Pada tanggal 15 Februari 2016, Telkomsel mengajukan banding kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPh Badan senilai Rp250 miliar (termasuk denda Rp81,1 miliar). Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2016, Telkomsel juga mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPN senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta).

Pada tanggal 6 Februari 2017, Telkomsel menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas PPN senilai Rp1,2 miliar yang mendukung Telkomsel. Selanjutnya, Telkomsel menerima restitusi pajak di bulan Maret dan Juni 2017. Pada tanggal 2 Maret 2017, Telkomsel menerima putusan dari Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPh Badan yang menerima sebagian dari banding Telkomsel senilai Rp247,6 miliar dan mencatatnya sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 31 Agustus 2017, Telkomsel menerima restitusi pajak. Di bulan Juli dan Oktober 2017, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPh Badan dan PPN masing-masing senilai Rp62 miliar dan Rp1,2 miliar. Atas hal ini, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali di bulan Agustus dan November 2017.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung secara parsial, dimana Mahkamah Agung menolak permintaan Otoritas Pajak berkaitan dengan PPN senilai Rp1,1 miliar. Pada tanggal 17 Oktober 2019, Perusahaan telah mengajukan surat kepada Pengadilan Pajak untuk meminta sisa putusan resmi terkait PPN tahun 2011 yang telah diumumkan oleh SC dimenangkan oleh Telkomsel.

Pada bulan Oktober 2019, Telkomsel telah menerima keputusan resmi dari Mahkamah Agung yang menolak permintaan Otoritas Pajak atas PPh Badan senilai Rp62 miliar. Pada tanggal 24 Januari 2020, Telkomsel telah menerima sisa keputusan resmi dari MA yang menolak permintaan Otoritas Pajak terkait PPN tahun 2011 sebesar Rp0,1 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

PPH dan PPN Tahun 2014

Pada tanggal 31 Mei 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2014 senilai Rp150,6 miliar (termasuk denda Rp54,6 miliar). Telkomsel menerima atas bagian senilai Rp16,5 miliar dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 dan dicatat sebagai beban lain-lain. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Telkomsel telah membayar sebesar Rp99,1 miliar dan mencatat sebagai tagihan restitusi pajak. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp134,1 miliar.

Pada tanggal 15 Juli dan 22 Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menerima sebesar Rp27,2 miliar dan menolak keberatan sebesar Rp106,8 miliar. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Telkomsel menerima sebagian restitusi pajak sebesar Rp27,2 miliar.

Pada tanggal 28 September 2020, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2014. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding masih dalam proses.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2015 senilai Rp384,8 miliar (termasuk denda Rp128,6 miliar) dan telah dibayar penuh pada tanggal 28 Agustus 2019. Atas nilai tagihan sebesar Rp34,6 miliar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dan saldo tersisa senilai Rp350,2 miliar dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 24 September 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp350,2 miliar.

Pada tanggal 13 Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menolak semua keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 28 September 2020, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2015. Sampai dengan tanggal persetujuan dan otorisasi untuk penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding masih dalam proses.

PPH dan PPN Tahun 2018

Pada tanggal 20 Februari 2020, Telkomsel menerima surat perintah pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2018. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	Dampak penerapan standar baru	Perubahan tarif pajak	(Dibebankan) Dikreditkan ke laporan laba rugi	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2020
<b>Perusahaan</b>							
Aset pajak tangguhan:							
Provisi penurunan nilai piutang	760	16	(126)	174	-	-	824
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala-bersih	837	-	(158)	(21)	546	-	1.204
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	427	-	32	(45)	-	-	414
Provisi imbalan karyawan	230	-	(12)	59	-	-	277
Pendapatan instalasi tangguhan	92	-	(17)	44	-	-	119
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	19	-	(1)	5	-	-	23
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	75	-	(8)	5	-	-	72
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.440</u>	<u>16</u>	<u>(290)</u>	<u>221</u>	<u>546</u>	<u>-</u>	<u>2.933</u>
Liabilitas pajak tangguhan:							
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	1	10	-	-	-
Sewa pembiayaan	(5)	-	1	1	-	-	(3)
Kapitalisasi biaya kontrak	-	(135)	15	30	-	-	(90)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(16)</u>	<u>(135)</u>	<u>17</u>	<u>41</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(93)</u>
<b>Telkomsel</b>							
Aset pajak tangguhan:							
Provisi imbalan karyawan	865	-	(186)	102	298	-	1.079
Provisi penurunan nilai piutang	259	44	(59)	38	-	-	282
Liabilitas kontrak	-	9	(1)	(8)	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	-	191	(109)	493	-	-	575
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>1.124</u>	<u>244</u>	<u>(355)</u>	<u>625</u>	<u>298</u>	<u>-</u>	<u>1.936</u>
Liabilitas pajak tangguhan:							
Sewa pembiayaan	(1.099)	1.100	-	-	-	-	1
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(557)	(1.290)	446	(122)	-	-	(1.523)
Amortisasi lisensi	(151)	-	31	(4)	-	-	(124)
Biaya kontrak	-	(27)	3	24	-	-	-
Instrumen keuangan lainnya	-	(5)	-	(65)	-	-	(70)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.807)</u>	<u>(222)</u>	<u>480</u>	<u>(167)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.716)</u>
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>2.424</u>	<u>(119)</u>	<u>(273)</u>	<u>262</u>	<u>546</u>	<u>-</u>	<u>2.840</u>
Aset / (liabilitas) pajak tangguhan Telkomsel - bersih	<u>(683)</u>	<u>22</u>	<u>125</u>	<u>458</u>	<u>298</u>	<u>-</u>	<u>220</u>
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>474</u>	<u>(2)</u>	<u>(57)</u>	<u>102</u>	<u>4</u>	<u>(3)</u>	<u>518</u>
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>(547)</u>	<u>7</u>	<u>(6)</u>	<u>(26)</u>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>(561)</u>
<b>Aset pajak tangguhan - bersih</b>	<b><u>2.215</u></b>	<b><u>(99)</u></b>	<b><u>(205)</u></b>	<b><u>822</u></b>	<b><u>848</u></b>	<b><u>(3)</u></b>	<b><u>3.578</u></b>
<b>Liabilitas pajak tangguhan - bersih</b>	<b><u>(547)</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>(6)</u></b>	<b><u>(26)</u></b>	<b><u>11</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(561)</u></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2018	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lainnya	Dibebankan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2019
<b>Perusahaan</b>					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala-bersih	663	(70)	244	-	837
Provisi penurunan nilai piutang	632	128	-	-	760
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	420	7	-	-	427
Provisi imbalan karyawan	215	15	-	-	230
Pendapatan instalasi tangguhan	92	0	-	-	92
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	79	(4)	-	-	75
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	9	10	-	-	19
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>2.110</u>	<u>86</u>	<u>244</u>	<u>-</u>	<u>2.440</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(1)	-	-	-	(5)
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	(4)	-	-	(11)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(12)</u>	<u>(4)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(16)</u>
<b>Jumlah aset pajak tangguhan</b>					
<b>Perusahaan - bersih</b>	<u>2.098</u>	<u>82</u>	<u>244</u>	<u>-</u>	<u>2.424</u>
<b>Aset pajak tangguhan</b>					
<b>entitas anak lainnya - bersih</b>	<u>406</u>	<u>152</u>	<u>10</u>	<u>(94)</u>	<u>474</u>
<b>Aset pajak tangguhan - bersih</b>	<u>2.504</u>	<u>234</u>	<u>254</u>	<u>(94)</u>	<u>2.898</u>
<b>Telkomsel</b>					
Aset pajak tangguhan:					
Provisi imbalan karyawan	641	83	141	-	865
Provisi penurunan nilai piutang	270	(11)	-	-	259
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>911</u>	<u>72</u>	<u>141</u>	<u>-</u>	<u>1.124</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(896)	(203)	-	-	(1.099)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(616)	68	-	(9)	(557)
Amortisasi lisensi	(118)	(33)	-	-	(151)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.630)</u>	<u>(168)</u>	<u>-</u>	<u>(9)</u>	<u>(1.807)</u>
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>					
<b>Telkomsel - bersih</b>	<u>(719)</u>	<u>(96)</u>	<u>141</u>	<u>(9)</u>	<u>(683)</u>
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>					
<b>entitas anak lainnya - bersih</b>	<u>(533)</u>	<u>165</u>	<u>16</u>	<u>(195)</u>	<u>(547)</u>
<b>Liabilitas pajak tangguhan - bersih</b>	<u>(1.252)</u>	<u>69</u>	<u>157</u>	<u>(204)</u>	<u>(1.230)</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp32.550 miliar dan Rp29.731 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat terealisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

g. Administrasi

Sejak tahun 2008 s.d. 2019, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Selanjutnya Perusahaan juga berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 3% karena memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No.30/2020. Berdasarkan hal tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 19% dan 20%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**28. PERPAJAKAN (lanjutan)**

g. Administrasi (lanjutan)

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan dan entitas anaknya dalam negeri menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 34/PMK.010/2017 tanggal 1 Maret 2017. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah melalui Keputusan DJP No.KEP-00080/WPJ.19/KP.04/2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tanggal 12 April 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 117/PMK.03/2019 tanggal 6 Agustus 2019, maka Perusahaan dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah senantiasa melakukan update terhadap peraturan yang mengatur insentif perpajakan. Pada bulan Juli 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 ("PMK-86/2020") tanggal 16 Juli 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dalam PMK-86/2020, Pemerintah melakukan perluasan Kode Lapangan Usaha ("KLU") Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan insentif perpajakan dan memperpanjang periode insentif sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan daftar KLU dalam lampiran PMK-86/2020, KLU Perusahaan termasuk sebagai penerima insentif PPh 21 Karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP). Dengan demikian, sejak masa pajak Juli s.d. Desember 2020, Perusahaan menerapkan PPh 21 karyawan DTP atas karyawan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK-86/2020.

**29. LABA PER SAHAM DASAR**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp20.804 miliar dan Rp18.663 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp210,01 dan Rp188,40 (dalam jumlah penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**30. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM**

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 133 tertanggal 24 Mei 2019, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun buku 2018 masing-masing sebesar Rp10.819 miliar (Rp109,22 per lembar saham) dan Rp5.410 miliar (Rp54,61 per lembar saham).

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 31 tertanggal 19 Juni 2020, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun buku 2019 masing-masing sebesar Rp11.197 miliar (Rp113,04 per lembar saham) dan Rp4.065 miliar (Rp41,03 per lembar saham).

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

**31. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA**

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya</b>			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	5.557	2.338
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	962	1.479
Telkomsel	31a.ii	3.852	2.209
Lainnya		1	0
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		10.372	6.026
Imbalan kesehatan pasca kerja	31b	1.407	996
Imbalan pasca kerja lainnya	31c	367	366
Imbalan tunjangan masa kerja	31d	53	-
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	31e	777	690
<b>Jumlah</b>		<b>12.976</b>	<b>8.078</b>

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Beban pensiun</b>			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	545	362
Manfaat tambahan	31a.i.a.ii	0	1
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	117	163
Telkomsel	31a.ii	142	314
Lainnya		0	0
Beban pensiun berkala, bersih	25	804	840
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih	25,31b	253	167
Beban imbalan pasca kerja lainnya	25,31c	81	33
Beban imbalan tunjangan masa kerja	25,31d	53	-
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	25,31e	258	136
<b>Jumlah</b>		<b>1.449</b>	<b>1.176</b>



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti</b>			
Perusahaan - <i>funded</i>	31a.i.a		
Manfaat pasti	31a.i.a.i	(2.942)	(1.116)
Manfaat tambahan	31a.i.a.ii	0	7
Perusahaan - <i>unfunded</i>	31a.i.b	89	(94)
Telkomsel	31a.ii	(1.554)	(561)
Lainnya		0	0
Beban imbalan kesehatan pasca kerja	31b	(158)	(634)
Beban imbalan pasca kerja lainnya	31c	(15)	(15)
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	31e	125	(107)
<b>Sub-jumlah</b>		<b>(4.455)</b>	<b>(2.520)</b>
Pajak tangguhan dengan tarif pajak yang berlaku	28f	859	411
<b>Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti - bersih</b>		<b>(3.596)</b>	<b>(2.109)</b>

**a. Beban manfaat pensiun**

i. Perusahaan

a. *Funded*

i. Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur didalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan peserta.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp205 miliar dan Rp233 miliar.

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki. Perusahaan memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perusahaan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)**

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Perubahan liabilitas manfaat pensiun</b>		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	22.061	20.121
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	260	259
Beban bunga	1.544	1.599
Kontribusi peserta program pensiun	27	33
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	2.741	1.514
Pembayaran pensiun	(1.530)	(1.465)
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	80	-
Pembayaran oleh Perusahaan	(80)	-
<b>Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun</b>	<b>25.103</b>	<b>22.061</b>
<b>Perubahan aset program pensiun</b>		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	19.723	19.064
Pendapatan bunga	1.383	1.524
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(201)	398
Kontribusi pemberi kerja	205	233
Kontribusi peserta program pensiun	27	32
Pembayaran pensiun	(1.530)	(1.465)
Beban administrasi program	(61)	(63)
<b>Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun</b>	<b>19.546</b>	<b>19.723</b>
<b>Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun</b>	<b>5.557</b>	<b>2.338</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)**

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset program terdiri dari:

	2020		2019	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	426	-	521	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	2.340	-	1.735	-
Infrastruktur, peralatan dan transportasi	540	-	540	-
Perdagangan, jasa dan investasi	336	-	395	-
Konstruksi, properti dan real estate	303	-	210	-
Industri dasar dan bahan kimia	290	-	135	-
Tambang	229	-	159	-
Agrikultur	62	-	70	-
Barang konsumen	21	-	1.085	-
Industri lainnya	246	-	292	-
Reksadana berbasis saham	678	-	1.027	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	6.208	-	6.077
Obligasi pemerintah	6.821	-	6.493	-
Reksadana	181	-	85	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	342	-	374
Properti	-	185	-	186
Lainnya	-	338	-	339
<b>Jumlah</b>	<b>12.473</b>	<b>7.073</b>	<b>12.747</b>	<b>6.976</b>

Aset program pensiun termasuk didalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp338 miliar dan Rp346 miliar, yang mewakili 1,73% dan 1,75% dari total aset program pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp352 miliar dan Rp341 miliar mewakili masing-masing 1,80% dan 1,73% dari total aset per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp1.121 miliar dan Rp1.858 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen diatas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Desember 2020, RKD Dapen dibawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2021.

Pada tahun 2020, Perusahaan memberikan manfaat kesejahteraan tambahan kepada Pensiunan dan penerima manfaat pensiun dari peserta yang memasuki masa pensiun sebelum 30 Juni 2002 dengan total sebesar Rp80 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSIIAN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)**

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (beban manfaat pensiun dibayar di muka) pada awal tahun	2.338	1.057
Beban pensiun berkala bersih	562	398
Kontribusi pemberi kerja	(205)	(233)
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	2.741	1.514
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	201	(398)
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(80)	-
<b>Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun</b>	<b>5.557</b>	<b>2.338</b>

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Beban jasa	260	259
Beban administrasi program	61	63
Beban bunga bersih	161	76
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	80	-
Beban pensiun berkala bersih	562	398
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(17)	(36)
<b>Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak</b>	<b>545</b>	<b>362</b>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	356	(677)
Perubahan asumsi finansial	2.190	1.952
Perubahan asumsi demografik	195	239
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	201	(398)
<b>Jumlah bersih</b>	<b>2.942</b>	<b>1.116</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSIIAN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)**

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat diskonto	6,50%	7,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

ii. Manfaat tambahan

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan Rasio Kecukupan Dana ("RKD") diatas 105% dan tingkat pengembalian investasi diatas suku bunga aktuarial untuk pendanaan.

Aset program untuk manfaat tambahan telah disisihkan sejak 2018 sesuai persetujuan Dewan Pengawas. Pada tanggal 31 Desember 2020, kewajiban manfaat tambahan telah dilunasi sepenuhnya kepada penerima pensiun dan tidak ada kewajiban tambahan yang disisihkan karena persyaratan pengakuan manfaat tambahan sebagaimana tersebut di atas belum terpenuhi.

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp41 miliar dan Rp55 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan penyeragaman bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan penyeragaman dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji reguler, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Mulai tanggal 1 April 2012, karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan tanpa permohonan maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)**

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun</b>	1.479	1.830
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	28	29
Beban bunga bersih	89	134
(Laba) rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(89)	94
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(545)	(608)
<b>Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir tahun</b>	<b>962</b>	<b>1.479</b>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Beban jasa	28	29
Beban bunga bersih	89	134
<b>Jumlah beban manfaat pensiun</b>	<b>117</b>	<b>163</b>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	(32)	12
Perubahan asumsi demografik	(99)	37
Perubahan asumsi finansial	42	45
<b>Jumlah bersih</b>	<b>(89)</b>	<b>94</b>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Tingkat diskonto	5,25%-6,50%	6,50%-7,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)**

**a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)**

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Berdasarkan program ini, karyawan berhak atas imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan gaji pokok terakhir atau gaji bersih yang diterima (tidak termasuk tunjangan fungsional) dan masa kerjanya. Program pensiun tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, melalui suatu kontrak asuransi anuitas. Hingga tahun 2004, karyawan berkontribusi pada program ini sebesar 5% dari gaji pokok bulanan mereka, sementara Telkomsel menanggung sisa besaran kontribusi yang diharuskan menurut program tersebut. Sejak tahun 2005, Telkomsel telah menanggung sepenuhnya besaran kontribusi tersebut.

Pada tahun 2020, kondisi keuangan Jiwasraya yang kurang menguntungkan telah memengaruhi secara negatif kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya kepada Telkomsel. Sebagai akibatnya, Jiwasraya dan Telkomsel menyepakati untuk merestrukturisasi program pensiun Telkomsel melalui penghentian program yang ada dan menetapkan suatu program baru dengan nilai imbalan yang dijamin sebesar Rp799 miliar pada tanggal 31 Desember 2020.

Sebagai bagian dari program restrukturisasi Jiwasraya, Indonesia Financial Group ("IFG") didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan, antara lain, pengambilalihan program-program Jiwasraya dengan pelanggannya. Setelah IFG beroperasi, imbalan baru yang dijamin tersebut di atas akan dialihkan kepada IFG oleh Jiwasraya dan dikelola dalam bentuk *saving plan* yang diperuntukkan khusus untuk mendanai imbalan pascakerja Telkomsel.

Jumlah kontribusi Telkomsel kepada Jiwasraya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp53 miliar dan Rp207 miliar.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 untuk program pensiun manfaat pasti:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Perubahan liabilitas manfaat pensiun</b>		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	3.738	2.734
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	245	187
Beban bunga	278	224
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	1.585	614
Pembayaran pensiun	(50)	(21)
Beban jasa akhir	(1.145)	-
<b>Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun</b>	<b><u>4.651</u></b>	<b><u>3.738</u></b>
<b>Perubahan aset program pensiun</b>		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	1.529	1.193
Pendapatan bunga	104	97
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	31	53
Kontribusi pemberi kerja	53	207
Pembayaran pensiun	(50)	(21)
Kerugian atas penyelesaian	(868)	-
<b>Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun</b>	<b><u>799</u></b>	<b><u>1.529</u></b>
<b>Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun</b>	<b><u>3.852</u></b>	<b><u>2.209</u></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)**

**a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)**

ii. Telkomsel (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	2.209	1.541
Beban manfaat pensiun	142	314
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	1.585	614
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(31)	(53)
Kontribusi pemberi kerja	<u>(53)</u>	<u>(207)</u>
<b>Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun</b>	<b><u>3.852</u></b>	<b><u>2.209</u></b>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban jasa	(33)	187
Beban bunga bersih	175	127
<b>Jumlah beban manfaat pensiun</b>	<b><u>142</u></b>	<b><u>314</u></b>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	190	115
Perubahan asumsi finansial	1.082	499
Perubahan demografis	313	-
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(31)	(53)
<b>Jumlah bersih</b>	<b><u>1.554</u></b>	<b><u>561</u></b>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan laporan tertanggal masing-masing 3 Maret 2021 dan 28 Februari 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	6,50%	7,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSIIAN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**b. Imbalan kesehatan pasca kerja**

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Telkom ("Yakes Telkom").

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja</b>		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	13.823	12.423
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban bunga	1.083	1.062
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	96	905
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(559)	(567)
<b>Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun</b>	<b>14.443</b>	<b>13.823</b>
<b>Perubahan aset program</b>		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	12.827	12.228
Pendapatan bunga	1.004	1.045
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(62)	271
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(559)	(567)
Beban administrasi program	(174)	(150)
<b>Nilai wajar aset program pada akhir tahun</b>	<b>13.036</b>	<b>12.827</b>
<b>Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun</b>	<b>1.407</b>	<b>996</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset program terdiri dari:

	2020		2019	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	745	-	563	-
Saham publik:				
Industri keuangan	1.191	-	954	-
Manufaktur dan konsumen	799	-	706	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	344	-	317	-
Konstruksi	219	-	181	-
Grosir	218	-	159	-
Tambang	199	-	117	-
Industri lainnya:				
Jasa	99	-	75	-
Bioteknologi dan industri farmasi	96	-	96	-
Agrikultur	45	-	49	-
Lainnya	1	-	3	-
Reksadana berbasis ekuitas	519	-	1.202	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	8.239	-	8.071	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	322	-	334
<b>Jumlah</b>	<b>12.714</b>	<b>322</b>	<b>12.493</b>	<b>334</b>

Aset program Yakes juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp246 miliar dan Rp222 miliar yang merupakan 1,88% dan 1,73% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp768 miliar dan Rp1.166 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	996	195
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	253	167
Rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	96	905
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	62	(271)
<b>Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun</b>	<b>1.407</b>	<b>996</b>

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban administrasi program	174	150
Beban bunga bersih	79	17
<b>Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja</b>	<b>253</b>	<b>167</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)**

**b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)**

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	(1.680)	810
Perubahan asumsi finansial	1.800	1.190
Perubahan asumsi demografik	(24)	(1.095)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	<u>62</u>	<u>(271)</u>
<b>Jumlah bersih</b>	<b><u>158</u></b>	<b><u>634</u></b>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2021 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	6,75%	8,00%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2020	2019
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

**c. Imbalan pasca kerja lainnya**

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP") dan Pesangon Meninggal Dunia ("Pesangon MD"). Pesangon MD diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia dengan besaran sebanyak 12 kali gaji terakhir.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	366	419
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	4	4
Beban bunga bersih	19	29
Beban jasa lalu - amandemen program	58	-
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	15	15
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	<u>(95)</u>	<u>(101)</u>
<b>Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir tahun</b>	<b><u>367</u></b>	<b><u>366</u></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSIIAN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)**

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban jasa	4	4
Beban bunga bersih	19	29
Beban jasa lalu	58	-
<b>Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya</b>	<b><u>81</u></b>	<b><u>33</u></b>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	(18)	(25)
Perubahan asumsi demografik	16	20
Perubahan asumsi finansial	17	20
<b>Jumlah bersih</b>	<b><u>15</u></b>	<b><u>15</u></b>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pada laporan masing-masing tertanggal 8 April 2020 dan 20 April 2020 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Tingkat diskonto	5,00%	6,25%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2011

**d. Imbalan khusus masa kerja**

Perusahaan memberikan Tunjangan Khusus Masa Kerja kepada karyawan dengan kriteria karyawan yang diangkat sebelum 1 Juli 2002 dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun serta berakhir hubungan kerja setelah 19 September 2019. Jumlah kewajiban dan beban imbalan khusus masa kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut masing-masing sebesar Rp53 miliar.

**e. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp777 miliar dan Rp690 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp258 miliar dan Rp136 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 25). (Laba) rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebesar Rp(125) miliar dan Rp107 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. PENSIIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)**

**f. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti**

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	Funded		Unfunded			
Manfaat pasti	Manfaat tambahan					
<b>31 Desember 2020</b>						
Dalam 10 tahun kedepan	18.913	-	1.061	3.795	5.649	417
Dalam 10-20 tahun	21.775	-	94	10.620	6.778	102
Dalam 20-30 tahun	19.869	-	77	8.203	5.575	78
Dalam 30-40 tahun	14.599	-	20	1.035	2.479	4
Dalam 40-50 tahun	3.278	-	-	-	398	-
Dalam 50-60 tahun	378	-	-	-	6	-
Dalam 60-70 tahun	23	-	-	-	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,48 tahun	10,48 tahun	5,76 tahun	11,00 tahun	15,14 tahun	7,21 tahun
<b>31 Desember 2019</b>						
Dalam 10 tahun kedepan	18.392	-	1.587	3.486	6.064	418
Dalam 10-20 tahun	21.855	-	125	9.420	8.001	68
Dalam 20-30 tahun	20.154	-	52	7.150	7.501	38
Dalam 30-40 tahun	15.351	-	18	1.267	4.123	3
Dalam 40-50 tahun	4.265	-	-	-	958	-
Dalam 50-60 tahun	468	-	-	-	42	-
Dalam 60-70 tahun	32	-	-	-	0	-
Dalam 70-80 tahun	0	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	10,16 tahun	10,16 tahun	4,69 tahun	10,44 tahun	13,34 tahun	3,65 tahun

**g. Analisis sensitivitas**

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak pada tahun 2020 dan 2019 atas liabilitas manfaat pasti sebagai berikut:

Sensitivitas	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
<b>31 Desember 2020</b>				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.305)	2.754	1.733	(1.547)
Tidak didanai	(36)	28	30	(39)
Telkomsel	(471)	507	494	(463)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.807)	2.339	2.248	(1.844)
Imbalan pasca kerja lainnya	(15)	17	-	-
<b>31 Desember 2019</b>				
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.952)	2.416	257	(275)
Tidak didanai	(40)	33	34	(43)
Telkomsel	(686)	777	390	(366)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.551)	1.888	2.030	(1.689)
Imbalan pasca kerja lainnya	(12)	13	-	-

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)**

**g. Analisis sensitivitas (lanjutan)**

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut di atas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

**32. Penghargaan Masa Kerja (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)**

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan *Long Service Leaves* (“LSL”). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp1.254 miliar dan Rp1.066 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Manfaat yang dibebankan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp290 miliar (Catatan 25).

**33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi**

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

<b>Pihak Berelasi</b>	<b>Hubungan</b>	<b>Sifat Saldo Akun/ Transaksi</b>
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sependengali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara Bank Mandiri	Entitas sependengali Entitas sependengali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BNI	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
BRI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan penghasilan pendanaan
PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Kimia Farma (Persero) ("Kimia Farma")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Taspen (Persero) ("Taspen")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Garuda Indonesia (Persero) ("Garuda Indonesia")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Pos Indonesia (Persero) ("Pos Indonesia")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi aset tetap, beban asuransi kecelakaan diri
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan beban listrik
Bahana TCW	Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual dan obligasi
PT Sarana Multi Infrastruktur	Entitas sepengendali	Pinjaman lainnya, biaya pendanaan
Tiphone	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Indonusa	Entitas asosiasi	Beban TV berbayar
Finarya	Entitas asosiasi	Beban pemasaran
Teltranet	Entitas asosiasi	Beban CPE, jasa sistem komunikasi
Yakes	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban pengobatan
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan voucher prabayar, dan pembelian aset tetap
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa jaringan, beban operasi dan pemeliharaan, pembelian aset tetap dan jasa konstruksi, dan distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup mencatat kerugian penurunan nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp141 miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi**

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
<b>PENDAPATAN</b>				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	184	0,13	101	0,07
Entitas sependengali				
Indosat	1.034	0,76	860	0,63
BRI	580	0,43	619	0,46
BNI	547	0,40	578	0,43
Pertamina	406	0,30	196	0,14
Bank Mandiri	191	0,14	204	0,15
Pegadaian	178	0,13	229	0,17
BTN	162	0,12	258	0,19
Kimia Farma	122	0,09	161	0,12
Pos Indonesia	115	0,08	216	0,16
Garuda Indonesia	115	0,08	112	0,08
Taspen	108	0,08	298	0,22
PLN	107	0,08	41	0,03
KAI	92	0,07	144	0,11
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	770	0,56	947	0,70
Sub-jumlah	4.527	3,32	4.863	3,59
Entitas berelasi lainnya				
Yakes	133	0,10	21	0,02
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	86	0,06	84	0,06
Sub-jumlah	219	0,16	105	0,08
Entitas asosiasi	47	0,03	75	0,06
<b>Jumlah</b>	<b>4.977</b>	<b>3,64</b>	<b>5.144</b>	<b>3,80</b>
	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
<b>BEBAN</b>				
Entitas sependengali				
PLN	2.859	3,07	2.434	2,59
Indosat	563	0,60	676	0,72
Jasindo	255	0,27	267	0,28
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	191	0,20	147	0,16
Sub-jumlah	3.868	4,14	3.524	3,75
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	1.072	1,15	1.049	1,12
Kisel	464	0,50	818	0,87
Yakes	125	0,13	133	0,14
Lain-lain di bawah Rp75 miliar)	121	0,13	1.275	1,36
Sub-jumlah	1.782	1,91	3.275	3,49
Entitas asosiasi				
Indonusa	432	0,46	437	0,47
Finarya	198	0,21	-	-
Teltranet	122	0,13	173	0,18
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	53	0,06	79	0,08
Sub-jumlah	805	0,86	689	0,73
<b>Jumlah</b>	<b>6.455</b>	<b>6,91</b>	<b>7.488</b>	<b>7,97</b>
	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
<b>Penghasilan pendanaan</b>				
Entitas sependengali				
Bank milik negara	564	70,59	743	68,04
Lain-lain	-	-	10	0,92
<b>Jumlah</b>	<b>564</b>	<b>70,59</b>	<b>753</b>	<b>68,96</b>



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)**

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
<b>Biaya pendanaan</b>				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	25	0,55	33	0,78
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	1.163	25,73	1.332	31,42
Sarana Multi Infrastruktur	313	6,92	263	6,20
<b>Jumlah</b>	<b>1.501</b>	<b>33,20</b>	<b>1.628</b>	<b>38,40</b>

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
<b>Pembelian aset tetap</b>				
Entitas sepengendali	57	0,19	69	0,19
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	161	0,55	158	0,44
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	121	0,41	115	0,32
Sub-jumlah	282	0,96	273	0,76
<b>Jumlah</b>	<b>339</b>	<b>1,15</b>	<b>342</b>	<b>0,95</b>

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
<b>Distribusi kartu SIM dan voucher</b>				
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	5.825	4,27	5.077	3,75
Gratika	436	0,32	563	0,42
Sub-jumlah	6.261	4,59	5.640	4,17
Entitas asosiasi				
Tiphone	1.766	1,29	5.927	4,37
<b>Jumlah</b>	<b>8.027</b>	<b>5,88</b>	<b>11.567</b>	<b>8,54</b>

**c. Saldo akun dengan pihak berelasi**

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
<b>Kas dan setara kas (Catatan 3)</b>	<b>14.745</b>	<b>5,97</b>	<b>13.315</b>	<b>6,02</b>
<b>Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)</b>	<b>1.108</b>	<b>0,45</b>	<b>71</b>	<b>0,03</b>
<b>Piutang usaha - bersih (Catatan 5)</b>	<b>1.644</b>	<b>0,67</b>	<b>1.792</b>	<b>0,81</b>
<b>Aset kontrak</b>				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	49	0,02	-	-
Entitas sepengendali				
Taspen	165	0,07	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	376	0,15	-	-
Sub-jumlah	541	0,22	-	-
Entitas asosiasi	1	0,00	-	-
Entitas berelasi lainnya	8	0,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>599</b>	<b>0,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aset lancar lainnya</b>	<b>209</b>	<b>0,08</b>	<b>111</b>	<b>0,05</b>
<b>Aset tidak lancar lainnya</b>	<b>29</b>	<b>0,01</b>	<b>31</b>	<b>0,01</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**c. Saldo akun dengan pihak berelasi (lanjutan)**

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
<b>Utang usaha (Catatan 16)</b>				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	1	0,00	5	0,00
Entitas sepengendali				
BUMN	337	0,27	206	0,20
Indosat	31	0,02	68	0,07
Lain-lain	17	0,01	-	-
Sub-jumlah	385	0,30	274	0,27
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	307	0,24	269	0,26
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp75 miliar)	235	0,19	271	0,26
Sub-jumlah	542	0,43	540	0,52
<b>Jumlah</b>	<b>928</b>	<b>0,73</b>	<b>819</b>	<b>0,79</b>
<b>Beban yang masih harus dibayar</b>				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	4	0,00	6	0,01
Entitas sepengendali				
BUMN	98	0,08	88	0,09
Bank milik negara	40	0,03	75	0,07
Lain-lain	6	0,00	-	-
Sub-jumlah	144	0,11	163	0,16
Entitas berelasi lainnya	77	0,06	203	0,19
<b>Jumlah</b>	<b>225</b>	<b>0,17</b>	<b>372</b>	<b>0,36</b>
<b>Liabilitas kontrak</b>				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	97	0,08	64	0,06
Entitas sepengendali				
BUMN	350	0,28	198	0,19
Lain-lain	3	0,00	1	0,00
Sub-jumlah	353	0,28	199	0,19
Entitas asosiasi	1	0,00	3	0,00
Entitas berelasi lainnya	5	0,00	5	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>456</b>	<b>0,36</b>	<b>271</b>	<b>0,25</b>
<b>Deposito pada pelanggan</b>	<b>19</b>	<b>0,02</b>	<b>25</b>	<b>0,03</b>
<b>Utang bank jangka pendek (Catatan 19)</b>	<b>3.797</b>	<b>3,01</b>	<b>3.655</b>	<b>3,52</b>
<b>Pinjaman penerusan (Catatan 20a)</b>	<b>568</b>	<b>0,45</b>	<b>736</b>	<b>0,71</b>
<b>Utang bank jangka panjang (Catatan 20c)</b>	<b>17.026</b>	<b>13,51</b>	<b>15.319</b>	<b>14,74</b>
<b>Pinjaman lainnya (Catatan 20d)</b>	<b>3.645</b>	<b>2,89</b>	<b>3.740</b>	<b>3,60</b>

**d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi**

**i. Pemerintah**

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 20a).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)**

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat *Multimedia Mobile* serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh ("SLJJ"), dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan PT Aplikanusa Lintasarta ("*Lintasarta*"). Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, telex, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Dayamitra menandatangani SPA dengan Indosat terkait pembelian menara milik Indosat. Selain itu, disepakati juga penyewaan kembali oleh Indosat atas menara telekomunikasi yang diakuisisi oleh Dayamitra yang ditandai dengan penandatanganan MTLA (Catatan 1e).

iii. Lain-lain

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, percetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan voucher pulsa isi ulang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**e. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas**

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	263	0,28%	270	0,29%
Dewan Komisaris	108	0,12%	123	0,13%

Jumlah yang disajikan pada tabel diatas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

**34. SEGMENT OPERASI**

Grup memiliki empat segmen utama yang dilaporkan, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise*, dan WIB. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, SMS, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa Indihome (terdiri dari jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, dan internet), dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen WIB menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkit, satelit, VSAT, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen lain-lain merupakan segmen *digital services* yang tidak memenuhi persyaratan pengungkapan dari laporan segmen ini. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan laporan segmen.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai yang dipercaya manajemen untuk merepresentasikan nilai pasar.

	2020					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
<b>Hasil segmen</b>								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	83.720	20.957	17.729	13.501	219	136.126	336	136.462
Pendapatan antar segmen	3.297	1.148	18.591	16.139	1.550	40.725	(40.725)	-
Jumlah pendapatan segmen	87.017	22.105	36.320	29.640	1.769	176.851	(40.389)	136.462
Beban segmen	(54.051)	(17.544)	(36.864)	(23.143)	(1.662)	(133.264)	40.307	(92.957)
Hasil segmen	32.966	4.561	(544)	6.497	107	43.587	(82)	43.505
<b>Informasi lain</b>								
Pembelian barang modal	(9.520)	(9.770)	(5.178)	(4.587)	(12)	(29.067)	(369)	(29.436)
Penyusutan dan amortisasi	(16.945)	(3.925)	(3.208)	(4.750)	(21)	(28.849)	(43)	(28.892)
Provisi diakui selama periode berjalan	(83)	(511)	(1.390)	(267)	(8)	(2.259)	(8)	(2.267)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**34. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

	2019					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
<b>Hasil segmen</b>								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	87.897	17.706	18.701	10.609	197	135.110	457	135.567
Pendapatan antar segmen	3.163	786	16.834	16.265	1.289	38.337	(38.337)	-
Jumlah pendapatan segmen	91.060	18.492	35.535	26.874	1.486	173.447	(37.880)	135.567
Beban segmen	(56.864)	(15.904)	(36.768)	(21.111)	(1.546)	(132.193)	39.020	(93.173)
Hasil segmen	34.196	2.588	(1.233)	5.763	(60)	41.254	1.140	42.394
<b>Informasi lain</b>								
Pembelian barang modal	(11.963)	(10.581)	(5.614)	(7.907)	(21)	(36.086)	(499)	(36.585)
Penyusutan dan amortisasi	(13.829)	(3.438)	(2.737)	(3.262)	(21)	(23.287)	109	(23.178)
Provisi diakui selama periode berjalan	(521)	(665)	(973)	(121)	(13)	(2.293)	10	(2.283)

Penyesuaian dan eliminasi:

	2020	2019
Hasil segmen	43.587	41.254
Rugi usaha unit bisnis	(627)	(599)
Eliminasi dan penyesuaian lainnya	545	1.739
<b>Laba usaha konsolidasi</b>	<b>43.505</b>	<b>42.394</b>

Informasi geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	2020	2019
Pendapatan eksternal		
Indonesia	130.097	130.989
Luar negeri	6.365	4.578
<b>Jumlah</b>	<b>136.462</b>	<b>135.567</b>

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	2020	2019
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	164.188	159.811
Luar negeri	3.581	3.608
<b>Jumlah</b>	<b>167.769</b>	<b>163.419</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI**

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**a. Tarif telepon tidak bergerak**

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- i. Biaya aktivasi
- ii. Biaya berlangganan
- iii. Biaya penggunaan
- iv. Biaya fasilitas tambahan.

**b. Tarif telepon selular**

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- i. Tarif jasa teleponi dasar
- ii. Tarif jelajah, dan/atau
- iii. Tarif jasa multimedia,  
dengan struktur tarif sebagai berikut:
  - i. Biaya aktivasi
  - ii. Biaya berlangganan bulanan
  - iii. Biaya penggunaan
  - iv. Biaya fasilitas tambahan.

**c. Tarif interkoneksi**

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**35. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)**

**c. Tarif interkoneksi (lanjutan)**

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/I/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

**d. Tarif sewa jaringan**

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

**e. Tarif jasa lainnya**

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN**

**a. Pembelian barang modal**

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi, dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	9.798
Dolar A.S.	66,05	929
HKD	0,24	0
<b>Jumlah</b>		<b>10.727</b>

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan, TII dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL") <i>Indonesia Global Gateway</i>
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	24 September 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OLT <i>Platform ZTE</i>
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	13 Oktober 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan ISP SKKL <i>Platform NEC</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	11 November 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet, BRAS, PCEF dan PE Transit <i>Platform Huawei - Metro Ethernet</i>
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	12 November 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan Metro Ethernet <i>Platform Nokia-ALU</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	18 November 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro-E, BRAS, PCEF, dan PE Transit <i>Platform Huawei - BRAS, PCEF</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	7 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform Huawei - NARU POP</i>
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	11 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM dan OTN <i>Platform Huawei - OTN SCN</i>
Perusahaan dan PT Lancs Arche Consumma	22 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Infinera - NARU dan Recovery</i>
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	29 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform Nokia</i>
Perusahaan dan PT Pembangunan Perumahan	30 Desember 2020	Perjanjian Pengadaan Pembangunan Konstruksi Gedung <i>Hyperscale Data Center</i>



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Pembelian barang modal (lanjutan)**

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Online Charging System</i> ("OCS") and <i>Service Control Points</i> ("SCP") <i>System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Technical Support</i> untuk Menyediakan Jasa <i>technical support</i> untuk OCS dan SCP
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan <i>Gateway GPRS Support Node</i> ("GGSN") <i>Service Complex</i>
Telkomsel, Wipro Limited, dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan <i>OSDSS Solution</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN Service Complex Rollout</i>
Telkomsel, PT NSNI, NSN Oy, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2018	Perjanjian Pengadaan <i>Ultimate Radio Network Infrastructure</i> ROA dan TSA
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia, dan PT Huawei Tech Investment	1 April 2018	Perjanjian Pengadaan <i>Mobile Network Router Infrastructure</i>
Telkomsel, PT Nokia Solutions and Networks Indonesia, dan NSN Oy.	17 April 2008 24 Mei 2019	Perjanjian Pengadaan <i>Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout</i> , telah diamandemen menjadi <i>CS Core System</i> ROA dan TSA
Telkomsel, PT Sigma Solusi Integrasi, Oracle Corporation, dan PT Phincon	5 Juli 2019	Perjanjian untuk <i>Development and Rollout Agreement</i> ("DRA") dan Dukungan Teknik pada <i>Customer Relationship Management</i> ("CRM") <i>Solution System Integrator</i>
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, dan Ericsson AB	17 April 2008 16 September 2019	Perjanjian Pengadaan <i>Combined 2G and 3G CS Core Network</i> , telah diamandemen menjadi <i>CS Core System</i> ROA dan TSA

(iii) TII

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telin Hongkong dan Measat Global Berhad	4 Mei 2016	Pengadaan Jasa Sewa Transponder
Telkom International Jakarta dan Pacific Century Cyberwork	12 September 2019	Pengadaan Barang dan Jasa <i>Pacific Light Cable Network</i> ("PLCN") <i>Cable System</i>

**b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya**

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	500	14 Maret 2022	Rp	172
BNI	500	31 Maret 2021	Rp	368
Bank Mandiri	500	23 Desember 2021	Rp	256
<b>Jumlah</b>	<b>1.500</b>			<b>796</b>

- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2020, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas yang digunakan
BRI	1.000	25 September 2022	Rp	590
BNI	2.100	11 Desember 2021	Rp	1.094
BCA	150	15 Juli 2021	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.250</b>			<b>1.684</b>

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 36c.i)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)**

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta atau setara dengan Rp211 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui sesuai dengan adendum IX (kesembilan) pada tanggal 23 Desember 2020 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$25 juta atau setara dengan Rp373 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 23 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020, TII belum menggunakan fasilitas bank garansi tersebut.

**c. Lainnya**

(i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 018/TEL.01.02/2019 Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 dari Menkominfo yang menggantikan Surat Keputusan No. 1987 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

1. Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
2. Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, No. 191 Tahun 2013, No. 509 Tahun 2016, No. 1896 Tahun 2017 dan No. 806 Tahun 2019, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz dan *surety bond* sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz (Catatan 36b.ii).

(ii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2021 hingga 2030. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kurang dari 1 tahun	2.012	1.722
1-5 tahun	5.909	4.446
Lebih dari 5 tahun	4.378	2.358
<b>Jumlah</b>	<b>12.299</b>	<b>8.526</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Lainnya (lanjutan)**

(iii) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Selanjutnya, Peraturan Menkominfo No. 17 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 19 tahun 2016 yang berlaku pada tanggal 4 November 2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kontribusi pengembangan KPU berlaku efektif untuk tahun 2016 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, dalam hal penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Program KPU), penyedia dipilih melalui proses seleksi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI"). BPPPTI menggantikan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 3 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018, BPPPTI berganti nama menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"). Berikutnya, Peraturan Menkominfo No. 25 tahun 2015 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 10 tahun 2018.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum pajak) di tahun 2019 dan tidak ada pembayaran tambahan selama tahun 2020.

(iv) Investasi di AKAB

Untuk mempercepat pengembangan bisnis telekomunikasi digital memerlukan kemitraan, sinergi dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan digital, Telkomsel melakukan investasi di AKAB yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penerbitan aplikasi (perangkat lunak) berbasis telepon seluler dengan merek dagang Gojek ("Platform Gojek") (Catatan 11). Pada tanggal 16 November 2020, AKAB dan Telkomsel melakukan kolaborasi strategis dengan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa dokumen perjanjian antara lain:

1. *Collaboration Agreement*/Perjanjian Kolaborasi;
2. *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman;
3. *Option Agreement*/Perjanjian Opsi;
4. *Conversion Side Letter*; dan
5. *Investment Term Sheet*.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**37. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING**

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
<b>Aset</b>				
Kas dan setara kas	193,91	0,68	15,34	2.947
Aset keuangan lancar lainnya	57,08	-	-	802
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,73	-	0,03	10
Pihak ketiga	160,56	-	7,15	2.364
Piutang lain-lain	0,38	-	0,15	8
Aset lancar lainnya	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	114,37	59,99	9,37	1.747
Jumlah aset	<u>527,03</u>	<u>60,67</u>	<u>32,04</u>	<u>7.878</u>
<b>Liabilitas</b>				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,02)	-	-	(0)
Pihak ketiga	(142,68)	(21,54)	(6,28)	(2.104)
Utang lain-lain	(3,58)	-	(2,07)	(79)
Biaya yang masih harus dibayar	(52,23)	(10,43)	(1,52)	(759)
Pinjaman bank jangka pendek	(6,17)	-	-	(87)
Uang muka pelanggan	(0,17)	-	-	(2)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(25,07)	(767,90)	(20,66)	(746)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(47,54)	(2.303,69)	(6,49)	(1.073)
Liabilitas lainnya	(12,49)	-	-	(176)
Jumlah liabilitas	<u>(289,95)</u>	<u>(3.103,56)</u>	<u>(37,02)</u>	<u>(5.026)</u>
<b>Aset (liabilitas) bersih</b>	<u><b>237,08</b></u>	<u><b>(3.042,89)</b></u>	<u><b>(4,98)</b></u>	<u><b>2.852</b></u>

	31 Desember 2019			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
<b>Aset</b>				
Kas dan setara kas	178,66	1,18	9,42	2.612
Aset keuangan lancar lainnya	14,18	-	1,74	221
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,12	-	-	2
Pihak ketiga	165,16	-	8,96	2.409
Piutang lain-lain	0,31	-	0,05	5
Aset lancar lainnya	-	-	0,89	12
Aset tidak lancar lainnya	63,29	49,15	12,28	1.044
Jumlah aset	<u>421,72</u>	<u>50,33</u>	<u>33,34</u>	<u>6.305</u>
<b>Liabilitas</b>				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,08)	-	-	(1)
Pihak ketiga	(131,14)	(4,25)	(5,23)	(1.869)
Utang lain-lain	(4,17)	-	(13,92)	(251)
Biaya yang masih harus dibayar	(46,57)	(152,56)	(2,02)	(691)
Utang bank jangka pendek	(1,19)	-	-	(16)
Uang muka pelanggan	(0,23)	-	-	(3)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(22,31)	(767,90)	(4,36)	(469)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(71,12)	(3.071,59)	(0,38)	(1.386)
Liabilitas lainnya	(13,94)	-	(0,01)	(194)
Jumlah liabilitas	<u>(290,75)</u>	<u>(3.996,30)</u>	<u>(25,92)</u>	<u>(4.880)</u>
<b>Aset (liabilitas) bersih</b>	<u><b>130,97</b></u>	<u><b>(3.945,97)</b></u>	<u><b>7,42</b></u>	<u><b>1.425</b></u>

\*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 menggunakan kurs tanggal 29 April 2021, keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp103 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. INSTRUMEN KEUANGAN**

**a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**

i. Klasifikasi

(a) Aset keuangan

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Pinjaman yang diberikan dan piutang</b>		
Kas dan setara kas	-	18.242
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	-	12.089
Aset keuangan lancar lainnya	-	483
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	258
<b>Aset keuangan tersedia untuk dijual</b>		
Penyertaan tersedia untuk dijual	-	1.124
<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>		
Kas dan setara kas	20.589	-
Aset keuangan lancar lainnya	1.194	-
Piutang usaha, bersih	11.339	-
Piutang lain-lain, bersih	214	-
Aset kontrak	1.239	-
Aset tidak lancar lainnya	215	-
<b>Nilai wajar melalui laporan laba rugi</b>		
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	4.045	-
Aset keuangan lancar lainnya	109	-
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b><u>38.944</u></b>	<b><u>32.196</u></b>

(b) Liabilitas keuangan

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</b>		
Utang usaha dan utang lain-lain	17.577	14.346
Beban yang masih harus dibayar	14.265	13.736
Utang bank jangka pendek	9.934	8.705
Pinjaman penerusan ( <i>two-step loans</i> )	568	736
Obligasi dan wesel bayar	7.469	9.958
Utang bank jangka panjang	28.229	26.605
Utang sewa pembiayaan	-	2.340
Kewajiban sewa	15.617	-
Pinjaman lainnya	3.645	3.740
Liabilitas lainnya	169	194
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b><u>97.473</u></b>	<b><u>80.360</u></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

ii. Nilai wajar

Tabel dibawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
<b>2020</b>					
<b>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar</b>					
Aset keuangan lancar lainnya	109	109	77	-	32
Penyertaan jangka panjang pada instrumen keuangan	4.045	4.045	-	2.115	1.930
<b>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</b>					
Pinjaman:					
Pinjaman penerusan ( <i>two-step loans</i> )	568	575	-	-	575
Obligasi dan wesel bayar	7.469	8.503	8.017	-	486
Utang bank jangka panjang	28.229	28.301	-	-	28.301
Kewajiban sewa	15.617	15.617	-	-	15.617
Pinjaman lainnya	3.645	3.631	-	-	3.631
Liabilitas lainnya	169	169	-	-	169
<b>Jumlah</b>	<b>59.851</b>	<b>60.950</b>	<b>8.094</b>	<b>2.115</b>	<b>50.741</b>

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
<b>2019</b>					
<b>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar</b>					
Penyertaan tersedia untuk dijual	1.124	1.124	71	-	1.053
<b>Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan</b>					
Pinjaman:					
Pinjaman penerusan ( <i>two-step loans</i> )	736	759	-	-	759
Obligasi dan wesel bayar	9.958	10.897	9.906	-	991
Utang bank jangka panjang	26.605	26.537	-	-	26.537
Utang sewa pembiayaan	2.340	2.340	-	-	2.340
Pinjaman lainnya	3.740	3.709	-	-	3.709
Liabilitas lainnya	194	194	-	-	194
<b>Jumlah</b>	<b>44.697</b>	<b>45.560</b>	<b>9.977</b>	<b>-</b>	<b>35.583</b>

Keuntungan atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020 senilai Rp128 miliar. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama tahun 2020.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah:

	2020	2019
Saldo awal	1.053	734
Penyesuaian saldo awal PSAK 71	294	-
Laba yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	128	3
Pembelian/penambahan	711	390
Penjualan/pengurangan	(224)	(74)
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.962</b>	<b>1.053</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

ii. Nilai wajar (lanjutan)

**Analisis sensitivitas**

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan informasi kuantitatif atas input signifikan yang tidak dapat diobservasi yang digunakan pada pengukuran nilai wajar level 3:

<u>Industri</u>	<u>Teknik valuasi</u>	<u>Input signifikan yang tidak dapat diobservasi</u>	<u>Rentang (rata-rata tertimbang)</u>	<u>Sensitivitas atas input nilai wajar</u>
<u>Investasi anak perusahaan</u> Investasi ekuitas tidak terdaftar - teknologi	<i>Backsolve method</i>	<i>Volatility</i>	30% - 120%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada percentage of volatility akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp32 miliar pada nilai investasi
		<i>Exit timing</i>	1 - 6 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun exit timing akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp30 miliar pada nilai investasi
	<i>Multiple and OPM</i>	<i>Volatility</i>	40% - 80%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada percentage of volatility akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp5 miliar pada nilai investasi
		<i>Exit timing</i>	1 - 6 Tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun exit timing akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp6 miliar pada nilai investasi
Investasi ekuitas tidak terdaftar - lembaga pemeringkat kredit	<i>Discounted cash flow</i>	<i>Equity value/revenue multiple</i>	8,1x - 10,1x	Kenaikan sebesar 1x atas equity value/revenue multiple akan menghasilkan kenaikan sebesar Rp2 miliar pada nilai investasi
		<i>Weighted Average Cost of Capital ("WACC")</i>	10,60% - 12,60%	Kenaikan (penurunan) sebesar 1% pada percentage of WACC akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp2 miliar pada nilai investasi
Investasi ekuitas tidak terdaftar - telekomunikasi	<i>Discounted cash flow</i>	<i>Terminal growth rate</i>	2,00% - 4,00%	Kenaikan (penurunan) sebesar 1% pada terminal growth rate akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp1 miliar pada nilai investasi
		<i>WACC</i>	3,40% - 17,00%	Kenaikan (penurunan) sebesar 0,5% pada WACC akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp17 miliar pada nilai investasi
		<i>Terminal growth rate</i>	-2,60% - 5,10%	Kenaikan (penurunan) sebesar 1% pada terminal growth rate akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp16 miliar pada nilai investasi

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Industri	Teknik valuasi	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi	Rentang (rata-rata tertimbang)	Sensitivitas atas input nilai wajar
<b>Obligasi konversi</b>				
Investasi ekuitas tidak terdaftar - teknologi	<i>Backsolve method</i>	<i>Volatility</i>	60% - 80%	Kenaikan (penurunan) sebesar 10% pada percentage of volatility akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp0 miliar pada nilai investasi
		<i>Exit timing</i>	1 - 3 tahun	Kenaikan (penurunan) pada 1 tahun exit timing akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp0 miliar pada nilai investasi
	<i>Multiple and OPM</i>	<i>Probability of qualified financing</i>	0% - 100%	Kenaikan (penurunan) sebesar 50% pada probability of qualified financing akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp4 miliar pada nilai investasi
	<i>CN with Conversion discount</i>	<i>Probability of qualified financing</i>	0% - 100%	Kenaikan (penurunan) sebesar 50% pada probability of qualified financing akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp19 miliar pada nilai investasi

iii. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan liabilitas tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (a) Nilai wajar pada laporan laba rugi, terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar dari obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (b) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- (a) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- (b) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan**

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga pasar, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

**i. Risiko nilai tukar mata uang asing**

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	2020		2019	
	Dolar A,S, (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A,S, (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,52	0,06	0,42	0,05
Liabilitas keuangan	(0,29)	(3,10)	(0,29)	(4,00)
<b>Eksposur bersih</b>	<b>0,23</b>	<b>(3,04)</b>	<b>0,13</b>	<b>(3,95)</b>

**Analisis sensitivitas**

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 31 Desember 2020 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	<u>Ekuitas/ laba (rugi)</u>
<b>31 Desember 2020</b>	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	33
Yen Jepang (penguatan 5%)	(21)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Desember 2020 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

**ii. Risiko harga pasar**

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)**

ii. Risiko harga pasar (lanjutan)

Kinerja aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

iii. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 19 dan 20). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pinjaman bunga tetap	(27.474)	(23.001)
Pinjaman bunga mengambang	(37.988)	(29.083)

**Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang**

Pada 31 Desember 2020, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp95 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

iv. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	2020	2019
Kas dan setara kas	20.589	18.242
Aset keuangan lancar lainnya	1.303	554
Piutang usaha, bersih	11.339	12.089
Piutang lain-lain, bersih	214	-
Aset kontrak	1.239	-
Aset tidak lancar lainnya	215	258
<b>Jumlah</b>	<b>34.899</b>	<b>31.143</b>

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)**

iv. Risiko kredit (lanjutan)

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 4,36% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

v. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio lancar dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2021	2022	2023	2024	2025 dan selanjutnya
<b>2020</b>							
Utang usaha dan lain-lain	17.577	(17.577)	(17.577)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	14.265	(14.265)	(14.265)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	568	(609)	(204)	(160)	(138)	(107)	-
Obligasi dan wesel bayar	7.469	(14.052)	(1.231)	(2.817)	(507)	(507)	(8.990)
Utang bank	38.163	(42.782)	(19.097)	(6.289)	(5.637)	(4.745)	(7.014)
Pinjaman lainnya	3.645	(4.164)	(1.291)	(1.210)	(1.138)	(525)	-
Kewajiban sewa	15.617	(17.678)	(6.096)	(3.812)	(2.887)	(1.864)	(3.019)
Liabilitas lainnya	169	(199)	(11)	(47)	(47)	(47)	(47)
<b>Jumlah</b>	<b>97.473</b>	<b>(111.326)</b>	<b>(59.772)</b>	<b>(14.335)</b>	<b>(10.354)</b>	<b>(7.795)</b>	<b>(19.070)</b>

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2020	2021	2022	2023	2024 dan selanjutnya
<b>2019</b>							
Utang usaha dan lain-lain	14.346	(14.346)	(14.346)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	13.736	(13.736)	(13.736)	-	-	-	-
Pinjaman							
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	736	(804)	(222)	(196)	(154)	(132)	(100)
Obligasi dan wesel bayar	9.958	(17.454)	(3.402)	(1.231)	(2.817)	(507)	(9.497)
Utang bank	35.310	(40.732)	(15.956)	(8.495)	(4.435)	(6.417)	(5.429)
Pinjaman lainnya	3.740	(4.534)	(926)	(1.082)	(1.010)	(948)	(568)
Utang sewa pembiayaan	2.340	(2.713)	(936)	(785)	(607)	(255)	(130)
Liabilitas lainnya	194	(223)	(12)	(52)	(53)	(53)	(53)
<b>Jumlah</b>	<b>80.360</b>	<b>(94.542)</b>	<b>(49.536)</b>	<b>(11.841)</b>	<b>(9.076)</b>	<b>(8.312)</b>	<b>(15.777)</b>

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. MANAJEMEN MODAL**

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	9.934	5,91%	8.705	5,74%
Utang jangka panjang	55.528	33,06%	43.379	28,61%
Total utang	65.462	38,97%	52.084	34,35%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	102.527	61,03%	99.561	65,65%
<b>Jumlah</b>	<b>167.989</b>	<b>100,00%</b>	<b>151.645</b>	<b>100,00%</b>

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Jumlah utang dengan bunga	65.462	52.084
Dikurangi: kas dan setara kas	(20.589)	(18.242)
Utang bersih	44.873	33.842
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	102.527	99.561
<b>Rasio utang bersih terhadap ekuitas</b>	<b>43,77%</b>	<b>33,99%</b>

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 20, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh pemberi pinjaman. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup sudah memenuhi beberapa persyaratan modal yang telah diberlakukan secara eksternal dengan pengecualian untuk beberapa entitas tertentu di dalam Grup (Catatan 20).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**40. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS**

- a. Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	5.175	5.459
Kapitalisasi bunga	160	99
Sewa pembiayaan	-	84
Penambahan aset hak-guna melalui kewajiban sewa	3.964	-
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	341	684

- b. Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2020	Arus kas	Perubahan nontunai				31 Desember 2020
			Implemen tasi standar baru	Perubahan valuta asing	Sewa baru	Perubahan lainnya	
Utang bank jangka pendek	8.705	1.252	-	(25)	-	2	9.934
Pinjaman penerusan (two step loan)	736	(203)	-	35	-	-	568
Obligasi dan wesel bayar	9.958	(2.491)	-	-	-	2	7.469
Utang bank jangka panjang	26.605	1.627	-	17	-	(20)	28.229
Pinjaman lainnya	3.740	(96)	-	-	-	1	3.645
Utang sewa pembiayaan	2.340	-	-	-	-	(2.340)	-
Kewajiban sewa	-	(4.802)	14.260	-	3.964	2.195	15.617
<b>Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>52.084</b>	<b>(4.713)</b>	<b>14.260</b>	<b>27</b>	<b>3.964</b>	<b>(160)</b>	<b>65.462</b>

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN**

- a. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Grup masih mengevaluasi dampak potensial penerapan peraturan pelaksana PP 35/2021, termasuk dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode pelaporan berikutnya.

- b. Pada tanggal 3 Februari 2021, Dayamitra melakukan pembelian saham PST sebanyak 134.999 saham dari Ibu Rahina Dewayani senilai Rp58 miliar sehingga kepemilikan Dayamitra atas PST berubah menjadi 99,99%.
- c. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No.02/KEP/DK/2021 tanggal 26 Februari 2021, susunan keanggotaan komite audit Perusahaan berubah menjadi sebagai berikut:

Komisaris Independen	Chandra Arie Setiawan
Komisaris Independen	Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen	Wawan Iriawan
Komisaris	Marcelino Rumambo Pandin
Komisaris	Ahmad Fikri Assegaf
Financial Expert	Emmanuel Bambang Suyitno

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**

- d. Di bulan Februari, Maret, dan April 2021, Grup melakukan pelunasan dan penarikan fasilitas pinjaman, sebagai berikut:
- i. Pada tanggal 25 dan 26 Februari 2021, Dayamitra melakukan penarikan pinjaman dari BCA, Bank Mandiri, Bank Permata, dan Sindikasi Bank Mandiri dan BNI masing-masing sebesar Rp1.750 miliar, Rp1.600 miliar, Rp500 miliar, dan Rp424 miliar.
  - ii. Pada tanggal 8 Maret 2021, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman dari BCA, Bank Mandiri, Bank of China, dan HSBC masing-masing sebesar Rp500 miliar, Rp2.000 miliar, Rp1.000 miliar (yang telah dilunasi pada tanggal 8 April 2021), dan Rp500 miliar.
  - iii. Pada tanggal 17 Maret 2021, Telkomsel melakukan pelunasan pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp2.000 miliar dan pada tanggal 31 Maret 2021, Telkomsel melakukan penarikan sebesar Rp1.000 miliar.
  - iv. Pada tanggal 23 dan 29 April 2021, Telkomsel melakukan penarikan pinjaman dari MUFG Bank dan BNI masing – masing sebesar Rp1.500 miliar dan Rp1.150 miliar.

**42. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* (“IFRS”)**

Dibawah ini disajikan ikhtisar perbedaan signifikan antara PSAK dan IFRS untuk tahun 2020.

Dampak perbedaan antara PSAK dan IFRS atas pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Referensi	PSAK	REKONSILIASI	IFRS
<b>ASET</b>				
Piutang usaha				
Pihak berelasi	b	1.644	699	2.343
Pihak ketiga	b	9.695	(699)	8.996
Aset lancar lainnya		6.561	25	6.586
Jumlah Aset Lancar		46.503	26	46.529
Aset tetap	a	160.923	(1.800)	159.123
Aset hak guna	a,d	18.566	538	19.104
Aset pajak tangguhan - bersih	d	3.578	165	3.743
Aset tidak lancar lainnya		4.833	1	4.834
Jumlah Aset Tidak Lancar		200.440	(1.096)	199.344
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>246.943</b>	<b>(1.070)</b>	<b>245.873</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
Utang usaha				
Pihak berelasi	b	928	1.229	2.157
Pihak ketiga	b	16.071	(1.229)	14.842
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	d	5.396	(591)	4.805
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		69.093	(593)	68.500
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	d	561	46	607
Liabilitas sewa	d	10.221	(149)	10.072
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		56.961	(102)	56.859
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>126.054</b>	<b>(695)</b>	<b>125.359</b>
<b>EKUITAS</b>				
Tambahan modal disetor	c	2.711	(734)	1.977
Komponen ekuitas lainnya		374	(138)	236
Saldo laba	c	94.489	719	95.208
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
pemilik entitas induk - bersih	d	102.527	(153)	102.374
kepentingan non-pengendali	d	18.362	(222)	18.140
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>120.889</b>	<b>(375)</b>	<b>120.514</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>246.943</b>	<b>(1.070)</b>	<b>245.873</b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**42. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (“IFRS”) (lanjutan)**

Dampak perbedaan atas pos-pos Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 antara PSAK dan IFRS adalah sebagai berikut:

	Referensi	PSAK	REKONSILIASI	IFRS
<b>PENDAPATAN</b>		<b>136.462</b>	<b>(15)</b>	<b>136.447</b>
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	d	(34.593)	18	(34.575)
Beban penyusutan dan amortisasi	a,d	(28.892)	(33)	(28.925)
Beban umum dan administrasi	d	(6.511)	(53)	(6.564)
Penghasilan lain-lain - bersih	d	403	536	939
<b>LABA USAHA</b>		<b>43.505</b>	<b>453</b>	<b>43.958</b>
Biaya pendanaan	d	(4.520)	(82)	(4.602)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>38.775</b>	<b>372</b>	<b>39.147</b>
<b>BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>(9.212)</b>	<b>(45)</b>	<b>(9.257)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>29.563</b>	<b>327</b>	<b>29.890</b>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		20.804	248	21.052
Kepentingan nonpengendali		8.759	79	8.838
		29.563	327	29.890
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b> (dalam jumlah penuh)				
Laba bersih per saham		210,01	2,50	212,51
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		21.000,94	250,35	21.251,29

**a. Hak atas tanah**

Berdasarkan PSAK, hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset hak-guna. Hak atas tanah diamortisasi selama masa sewa.

**b. Transaksi dengan pihak berelasi**

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten, atau Perusahaan Publik, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Berdasarkan IFRS, entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga sejenis baik lokal, nasional, maupun internasional.

**c. Selisih transaksi restrukturisasi entitas sependendali**

Menurut PSAK, selisih transaksi restrukturisasi entitas sependendali masuk ke dalam kelompok tambahan modal disetor di ekuitas. Sementara menurut IFRS, selisih transaksi restrukturisasi entitas sependendali masuk ke dalam kelompok laba ditahan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**42. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* (“IFRS”) (lanjutan)**

**d. Perbedaan waktu penerapan standar akuntansi**

Grup menerapkan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa mulai tanggal 1 Januari 2020. Penerapan tersebut setara dengan standar akuntansi IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customer* dan IFRS 9 *Financial Instruments* yang berlaku efektif dan diimplementasikan oleh Grup mulai tanggal 1 Januari 2018 sedangkan IFRS 16 *Leases* diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2019. Perbedaan waktu penerapan standar akuntansi menyebabkan perbedaan di beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian.